

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA 2011-2015

HASYA NOVIAR GEMILANG

8335132490



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI AUDIT
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

***THE INFLUENCE OF GENERAL ALLOCATION FUND,
SPECIAL ALLOCATION FUND, SHARING FUND, ORIGINAL
GOVERNMENT REVENUE AND POPULATION ON LOCAL
EXPENDITURE OF PROVINCE IN INDONESIA 2011-2015***

HASYA NOVIAR GEMILANG

8335132490



**This Thesis Compiled As One Of The Requirements For Obtaining a
Bachelor Degree in Economics, Universitas Negeri Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
CONCENTRATION IN AUDITING
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

HASYA NOVIAR GEMILANG. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Seluruh Provinsi di Indonesia 2011-2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Periode dalam penelitian ini selama 5 tahun, 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh 31 sampel dari total 34 populasi.

Hasil penelitian ini adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada provinsi di seluruh Indonesia periode 2011-2015.

Kata kunci: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, belanja daerah.

ABSTRACT

HASYA NOVIAR GEMILANG. *The Influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Sharing Fund, Original Government Revenue and Population on Local Expenditure of Province in Indonesia 2011-2015.* Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017.

This research aims to analyze the influence between general allocation fund, special allocation fund, sharing fund, original government revenue, and population on local expenditure. Period used are five years, from 2011 to 2015, using secondary data such as financial statements of local government published by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) and statistic of Indonesia published by Badan Pusat Statistic (BPS). The techniques used for sampling is purposive sampling, hence 31 province with a total population of 34.

The result shows that general allocation fund, special allocation fund, sharing fund, original government revenue had a significant impact to local expenditure. Population had no significant influence to local expenditure of province in Indonesia 2011-2015.





Keywords: *general allocation fund, special allocation fund, sharing fund, original government revenue, population, local expenditure*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi**



Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. IGKA Ulupui, SE., M.Si., Ak, CA</u> NIP. 19661213 199303 2 003	Ketua Penguji		25/7/2017
<u>Indah Muliasari, SE., Ak., M.Ak</u> NIDK. 8886100016	Sekretaris		24/7/2017
<u>Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Penguji Ahli		25/7/2017
<u>Dr. Rida Prihatni, SE., Akt, M.Si</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Pembimbing I		26/7/2017
<u>Tri Hesti Utamingtyas, SE., M.SA</u> NIP. 19760107 200112 2 001	Pembimbing II		25/7/2017

Tanggal Lulus: 17 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya mengajukan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Hasya Noviar Gemilang

8335132490

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, atas petunjuk dan ridho-Nya telah diberikan kepada saya selaku Penulis sehingga dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini;
2. Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk cepat lulus. Terima kasih karena selalu mendoakan dan selalu mendukung dalam kondisi apapun. Dan adik-adik saya, Hafiyyan dan Ghaniya yang selalu berbagi canda dan tawa;
3. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung membantu penulis dalam melaksanakan Penulisan;
4. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

5. Ibu Dr. Rida Prihatni SE, Akt., M.Si dan Ibu Tri Hesti Utaminingtyas SE, M.SA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
6. Seluruh Dosen FE UNJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
7. R. Mega Prasetyo Harimurti, partner terbaik saya, terima kasih untuk selalu meluangkan waktu, selalu mendoakan, selalu memotivasi, dan atas pengertiannya selama ini;
8. Fiona Olga Livia dan Qayumah, sahabat sejak SMA yang selalu mengerti saya, terima kasih untuk selalu ada saat dibutuhkan dan selalu membuatku tertawa;
9. Rianti Puspita Dewi, Ellyne Rachmania, dan Irma Yunita Effendi yang menjadi tempat berbagi senang dan sedih selama di bangku perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Reguler A 2013. Terima kasih atas kenangan kita selama 4 tahun ini;
11. Danus HMJ Akuntansi. Kak Tiwy, Kak Tata, Rianti, Ulfa, Yoga, dan Haris, terima kasih sudah menjadi keluarga kedua yang menjadi teman cerita, teman makan, dan teman jalan-jalan;
12. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang positif.

Jakarta, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	13
A. Deskripsi Konseptual	13
1. <i>Agency Theory</i>	13
2. Laporan Realisasi Anggaran	15
3. Belanja Daerah	17
4. Dana Alokasi Umum	20

5. Dana Alokasi Khusus	22
6. Dana Bagi Hasil.....	24
7. Pendapatan Asli Daerah	26
8. Jumlah Penduduk	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Teoritik.....	36
D. Perumusan Hipotesis	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Tujuan Penelitian	45
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Metode Penelitian.....	46
D. Populasi dan Sampel	46
E. Operasional Variabel Penelitian.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	51
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	51
2. Uji Asumsi Klasik	52
3. Analisis Regresi Linear Berganda	54
4. Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Deskripsi Data	57
B. Pengujian Kualitas Data.....	69
1. Uji Asumsi Klasik	69
a. Uji Normalitas.....	70

b. Uji Multikolinearitas.....	72
c. Uji Heterokedastisitas	73
d. Uji Autokorelasi.....	73
2. Uji Regresi Linier Berganda.....	74
3. Uji Hipotesis.....	77
a. Uji Statistik F.....	77
b. Uji Statistik t.....	77
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	80
C. Pembahasan	80
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Implikasi	92
C. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Kartu Bimbingan Skripsi	98
Lampiran 2	Data Penelitian Sebelum Outlier	100
Lampiran 3	Data Penelitian (Log Normalitas) Sebelum Outlier	107
Lampiran 4	Statistik Deskriptif	111
Lampiran 5	Tahapan Outlier	112
Lampiran 6	Data Penelitian Sesudah Outlier	115
Lampiran 7	Data Penelitian (Log Normalitas) Sesudah Outlier	121
Lampiran 8	Hasil Uji Normalitas	125
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas	126
Lampiran 10	Hasil Uji Heterokedastisitas	127
Lampiran 11	Hasil Uji Autokorelasi	128
Lampiran 12	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	129
Lampiran 13	Hasil Uji F	130
Lampiran 14	Hasil Uji t	131
Lampiran 15	Hasil Uji Koefisien Determinasi	132
Lampiran 16	Daftar Riwayat Hidup	133

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
II.1	<i>Literature Review</i>	29
IV.1	Seleksi Pemilihan Sampel.....	58
IV.2	Statistik Deskriptif	58
IV.3	Distribusi Frekuensi Belanja Daerah	59
IV.4	Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Umum	62
IV.5	Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Khusus	63
IV.6	Distribusi Frekuensi Dana Bagi Hasil	65
IV.7	Distribusi Frekuensi Pendapatan Asli Daerah	66
IV.8	Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk	68
IV.9	Uji Normalitas.....	71
IV.10	Uji Multikolonieritas.....	72
IV.11	Uji Autokorelasi.....	74
IV.12	Uji Regresi Linier Berganda	74
IV.13	Uji F	77
IV.14	Uji t	78
IV.15	Uji Koefisien Determinasi	80
IV.16	Pembuktian Hipotesis 3	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
II.1	LRA Sumatera Utara 2015	17
II.2	Kerangka Teoritik.....	39
IV.1	Grafik Histogram Belanja Daerah	60
IV.2	Grafik Histogram DAU	62
IV.3	Grafik Histogram DAK	63
IV.4	Grafik Histogram DBH.....	65
IV.5	Grafik Histogram PAD	67
IV.6	Grafik Histogram Jumlah Penduduk.....	68
IV.7	Grafik Scatterplot.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan. Namun pelaksanaannya baru efektif pada Januari 2001. Setelah UU tersebut, ada pula UU yang terbaru yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi, maka di setiap daerah di Indonesia menerapkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bastian, 2005:338). Tingkat kemandirian daerah juga diharapkan meningkat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya secara efisien dan efektif (Devita, Arman, dan Junaidi, 2014). Dengan kata lain, Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan juga dana yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri guna membangun perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui belanja daerah (Putra dan Dwirandra, 2015).

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Standar Analisa Belanja (SAB), belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan (Mardiasmo, 2002:194). Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Renyowijoyo, 2010:175).

Sejak 2015, alokasi belanja daerah tidak proporsional. Belanja pegawai merupakan komponen belanja daerah yang menyerap APBD paling besar. Rata-rata belanja pegawai tingkat provinsi sebesar 40% menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kemenkeu (www.ekbis.sindonews.com, Januari 2017). Sedangkan rata-rata untuk belanja modal hanya 20% saja. Pada tahun 2016, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD mencapai 43,59%. Sedangkan untuk belanja modal hanya 22,9%. Apabila belanja pegawai dilihat dari tingkat

kabupaten/kota, rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD mencapai 68,4%. Padahal menurut DJPK Kemenkeu belanja pegawai tidak boleh melebihi 50% (www.finance.detik.com, Februari 2017). Hal ini sangat disayangkan karena sebagian besar APBD dihabiskan hanya untuk belanja pegawai yang mengakibatkan porsi belanja modal ataupun belanja yang lain hanya sedikit. Selain itu, tidak adanya pembukaan CPNS juga menjadi akibat tingginya belanja pegawai. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas belanja daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah baik melalui infrastruktur daerah maupun pelayanan publik dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas belanja daerah, untuk tahun 2017 pemerintah menyediakan dana untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 387triliun. Infrastruktur merupakan salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai (www.finance.detik.com, Februari 2017). Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan, waduk, dan irigasi. Dana tersebut akan disebarkan ke daerah melalui dana transfer yang berupa Dana Alokasi Khusus (www.finance.detik.com, Oktober 2016).

Selain kasus-kasus diatas, adapula kasus tingginya simpanan uang Pemda di bank. Uang yang mengendap ini menandakan serapan anggaran pemerintah masih rendah. Uang tersebut seharusnya bisa untuk belanja modal atau infrastruktur yang guna meningkatkan perekonomian daerah. Daerah yang

memiliki simpanan terbesar di bank per Desember 2015 yaitu DKI Jakarta Rp7,84 triliun, Jawa Barat Rp3,74 triliun, Riau Rp2,32 triliun, Jawa Tengah Rp1,69 triliun, Papua Rp1,47 triliun, Jawa Timur Rp1,39 triliun, Aceh Rp1,21 triliun, Banten Rp1,13 triliun, Bali Rp777,2 miliar, dan Kalimantan Utara Rp738,1 miliar (www.finance.detik.com, Januari 2016). Oleh karena itu, terdapat sistem *punishment & reward* bagi daerah. *Punishment* bisa berupa penundaan penyaluran DAU dan DAK. Mengenai kasus rendahnya penyerapan APBD menurut website CNN Indonesia (www.cnnindonesia.com pada Desember 2015), Kemenkeu juga hanya mencairkan jatah 20% DAK tahap IV kepada Pemda yang tingkat penyerapan belanjanya hanya sampai 90%, dibawah penyerapan 90% DAK tidak dapat dicairkan. Selain itu, Kemenkeu juga akan mengkonversi penyaluran dana ke daerah yang kurang bagus penyerapannya dari tunai menjadi non tunai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan juga akan berdampak pada pengalokasian DAK di tahun berikutnya. Sedangkan *reward* berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Pada umumnya, pemerintah daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat dalam hal belanja daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendapatan yang dimiliki daerah masih didominasi oleh dana bantuan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain transfer dari pemerintah pusat. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat-daerah, mengatasi personalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk

menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Hakim, 2003).

Dana bantuan atau transfer yang diberikan pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBH). Sedangkan dana yang diperoleh dari daerah sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2016 sempat tertahan hingga pelunasannya paling lambat Desember 2016 sampai Januari 2017. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh Pemerintah Pusat. Selain karena alasan tersebut, ada juga unsur *punishment* yang diberikan Kemenkeu selaku Pemerintah Pusat. DJPK menegaskan dengan keterlambatan ini tidak begitu berpengaruh karena DAU bukanlah satu-satunya sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Dengan keterlambatan penyaluran DAU ini, pemerintah daerah harus dapat bertahan dengan APBD yang ada, Kalimantan Selatan contohnya. Kalimantan Selatan menyiasati dengan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk belanja daerah (www.finance.detik.com, Agustus 2016). Tak hanya DAU yang pengalokasiannya terlambat, DAK dan DBH juga mengalami keterlambatan dalam proses alokasinya. Contohnya seperti yang terjadi pada

Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak Rp42 miliar DAK di triwulan III dan IV 2016 masih mengambang. Dampak dari hal tersebut, timbul tunggakan terkait proyek pekerjaan dengan pihak ketiga dan juga molornya pembangunan yang sedang dikerjakan di daerah tersebut (www.manadopostonline.com, Maret 2017). Kasus tunggakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai DBH terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat tunggakan sebesar Rp336,6 miliar sejak 2014 dan mengakibatkan banyak proyek yang sudah direncanakan tidak bisa dikerjakan (www.republika.co.id, Oktober 2016). Untuk menyasati kasus-kasus seperti ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor yang ada di daerahnya guna menjaga kestabilan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Putra dan Dwirandra, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. PAD tiap daerah berbeda-beda. Kinerja keuangan suatu daerah bisa dinilai melalui tinggi rendahnya PAD yang dihasilkan oleh daerah (Sari dan Indrajaya, 2014). Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibanding daerah lainnya. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan PAD yang akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan belanja di setiap daerah (Purpitasari, 2015).

Belanja di suatu daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu daerah bisa menjadi aset ataupun beban dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas, keahlian, dan keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Sedangkan menjadi beban apabila struktur belanja daerah rendah dan persebaran serta mutunya rendah sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah (Devita, Delis, dan Junaidi, 2014). Contoh menjadi beban apabila tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut tinggi. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2016 lebih dari 10% jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan mampu membelanjakan anggaran secara lebih baik dan memberikan dana transfer yang lebih banyak dari sebelumnya untuk mengurangi persentase kemiskinan Indonesia menjadi satu digit (www.tempo.co, Maret 2017).

Ada beberapa penelitian sebelumnya membahas fenomena “Belanja Daerah” ini. Penelitian Putra dan Dwirandra (2015) membahas mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Hasil dari penelitian tersebut adalah DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. DAK berpengaruh namun tidak signifikan terhadap belanja daerah dan tidak terjadi fenomena *flypaper effect* di Bali. Selanjutnya, Puput Purpitasari (2015) meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Hasilnya menyatakan PAD dan DAU berpengaruh positif

terhadap belanja daerah. Segoro dan Pratiwi (2014) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012. Hasil dari penelitian tersebut PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Sedangkan DAK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Devita, Delis, dan Junaidi (2014) meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Sasana pada tahun 2011 melakukan penelitian mengenai analisis determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, dana perimbangan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan PAD berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah. Keterbatasan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sampel yang dilakukan rata-rata hanya melakukan di satu wilayah provinsi saja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan adanya perbedaan hasil dan objek penelitian terdahulu. Berdasarkan *research gap* di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum**

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia Periode 2011-2015”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang mempengaruhi Belanja Daerah yaitu:

1. Alokasi belanja daerah yang tidak proporsional yang ditunjukkan dengan tingginya persentase belanja pegawai dan rendahnya persentase belanja modal
2. Rendahnya penyerapan APBD oleh Pemda yang menyebabkan adanya timbunan dana di bank daerah di beberapa daerah
3. Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat
4. Adanya keterlambatan penyaluran DAU, DAK, dan DBH oleh Pemerintah Pusat kepada sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia
5. Pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus terhadap pengumpulan potensi daerahnya untuk menggali PAD
6. Adanya ketimpangan PAD yang mengakibatkan berbedanya penerimaan dan pengeluaran di setiap daerah di Indonesia
7. Jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi aset atau beban bagi pembangunan suatu daerah

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara fokus. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian yang diteliti adalah Provinsi di Indonesia
2. Sampel yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran seluruh Provinsi di Indonesia dengan rentang waktu dari tahun 2011-2015
3. Determinan yang digunakan sebagai pengaruh terhadap fenomena Belanja Daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?

5. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori agensi hubungannya antara *principal* dan *agent* yang pada penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah selaku *agent* diberikan wewenang untuk melakukan urusan daerahnya sendiri dan bertanggungjawab untuk melaporkan segala aktivitas dan kegiatannya kepada Pemerintah Pusat (*principal*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya dan proporsional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Agency Theory

Teori agensi dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini mengatakan “*Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan hubungan antara suatu pihak yang memberi wewenang (prinsipal) kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan.

Dalam teori ini dijelaskan pula bahwa prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban memberikan imbalan kepada agen. Sedangkan agen berkewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan terjadi di berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Sesuai dengan teori agensi dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya, hal tersebut sesuai dengan asas

desentralisasi yang timbul akibat adanya otonomi daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sejak diberlakukan desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus daerahnya dan mengelola sumber daya yang dimilikinya sendiri, termasuk juga menentukan pengeluaran daerahnya yang pada khususnya adalah belanja daerah.

Selain itu, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa akan ada perbedaan antara keputusan yang diambil oleh agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal akan mengawasi agen dan menyiapkan *bonding cost* yang merupakan pengeluaran yang disebabkan oleh agen (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam kasus ini, dapat dilihat dari tingginya persentase belanja pegawai yang mendominasi belanja pada APBD yang mengakibatkan persentase belanja yang lain misalnya belanja modal atau belanja infrastruktur hanya sedikit dan tidak maksimal. Hal ini menunjukkan kualitas belanja daerah perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan daerah. Dengan meningkatnya kesejahteraan daerah, maka perekonomian daerah tersebut akan naik dan mengurangi kemiskinan yang umumnya terdesentralisasi di desa-desa. Dengan meningkatnya perekonomian daerah, maka perekonomian Negara pun akan membaik yang dalam hal ini merupakan tujuan dari Pemerintah Pusat.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Kinerja Keuangan, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, seperti dana perimbangan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015 (Audited)	%	REALISASI 2014 (Audited)
PENDAPATAN – LRA	4.1.1.	8.452.310.815.631,00	8.480.758.952.970,01	100,34	7.772.029.153.270,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	4.1.1.1.	4.623.636.999.015,00	4.883.880.619.308,22	105,63	4.416.811.865.266,62
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.1.1.1.1.	4.180.782.532.441,00	4.427.143.658.803,00	105,89	4.054.634.671.325,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.1.1.1.2.	31.129.676.250,00	36.071.947.471,00	115,88	78.497.614.144,49
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.1.1.1.3.	255.650.903.282,00	250.240.903.282,00	97,88	156.330.872.843,00
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	4.1.1.1.4.	156.073.887.042,00	170.424.109.752,22	109,19	127.348.706.954,13
PENDAPATAN TRANSFER		3.793.634.778.000,00	3.582.796.982.616,00	94,44	3.321.429.286.013,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.712.730.578.000,00	1.521.253.168.298,00	88,82	1.812.638.981.079,00
Dana Bagi Hasil Pajak		457.217.937.000,00	313.793.085.550,00	68,63	380.468.138.948,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		29.438.760.000,00	20.451.831.248,00	69,47	23.310.178.131,00
Dana Alokasi Umum		1.139.261.371.000,00	1.139.261.371.000,00	100,00	1.349.132.276.000,00
Dana Alokasi Khusus		86.812.510.000,00	47.746.880.500,00	55,00	59.728.388.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		2.080.904.200.000,00	2.061.543.814.318,00	99,07	1.508.790.304.934,00
Dana Penyesuaian		2.080.904.200.000,00	2.061.543.814.318,00	99,07	1.508.790.304.934,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		35.039.038.616,00	14.081.351.045,79	40,19	33.788.001.991,00
Pendapatan Hibah		34.272.194.639,00	10.809.017.000,00	31,54	9.797.701.000,00
Pendapatan Lainnya		766.843.977,00	3.272.334.045,79	426,73	23.990.300.991,00
BELANJA		6.112.112.070.632,00	5.628.338.813.603,60	92,09	6.115.747.670.917,20
BELANJA OPERASI		5.081.296.132.780,00	4.696.094.464.354,60	92,42	4.965.293.096.270,20
Belanja Pegawai		1.324.368.936.734,00	1.206.391.354.315,00	91,09	1.152.702.187.401,00
Belanja Barang dan Jasa		1.168.022.051.400,00	989.746.989.128,60	84,74	1.146.633.040.611,20
Belanja Hibah		2.131.351.406.650,00	2.094.026.766.000,00	98,25	1.611.718.256.710,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	1.065.000.000,00
Bantuan Keuangan		457.553.737.995,00	405.929.354.911,00	88,72	1.053.174.611.548,00
BELANJA MODAL		1.023.315.937.852,00	932.244.349.249,00	91,10	1.145.972.228.647,00
Belanja Modal Tanah		180.000.000,00	179.915.000,00	99,95	584.968.223,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		115.926.365.173,00	82.077.844.699,00	70,80	176.558.909.856,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		92.428.762.547,00	83.184.924.682,00	90,00	114.023.487.525,00
Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan		789.373.743.941,00	744.012.083.627,00	94,25	852.281.346.468,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		25.407.066.191,00	22.789.581.241,00	89,70	2.523.516.575,00
BELANJA TAK TERDUGA		7.500.000.000,00	0,00	0,00	4.482.346.000,00
Belanja Tak Terduga		7.500.000.000,00	0,00	0,00	4.482.346.000,00
TRANSFER		2.330.828.370.083,00	2.330.828.370.083,00	100,00	1.692.809.638.822,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		2.330.828.370.083,00	2.330.828.370.083,00	100,00	1.692.809.638.822,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.330.828.370.083,00	2.330.828.370.083,00	100,00	1.692.306.012.773,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	503.626.049,00
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		14.897.905.723,00	14.897.905.723,21	100,00	51.426.062.191,79
Penggunaan SILPA		14.897.905.723,00	14.897.905.723,21	100,00	51.426.062.191,79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		24.268.280.639,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		24.268.280.639,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(9.370.374.916,00)	14.897.905.723,21	158,9966	51.426.062.191,79
SILPA SEBELUM KOREKSI		0,00	536.489.675.006,62	0,00	14.897.905.723,21
KOREKSI SILPA		0,00	(214.833.584,00)	0,00	0,00
SILPA SETELAH KOREKSI		0,00	536.274.841.422,62	0,00	14.897.905.723,21

Sumber: LKPD Provinsi Aceh 2015

Gambar II.1

LRA Sumatera Utara 2015

3. Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai

belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Renyowijoyo, 2010:175). Belanja setiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2002:185), belanja daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut Ulum (2005), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya.

Belanja menurut PP No 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi: pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja Modal: pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud.
- c. Belanja Lain-Lain/Tak Terduga: pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Sedangkan menurut Permendagri No. 21 tahun 2011, klasifikasi belanja daerah yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, iuran asuransi kesehatan, uang duka, uang jasa pengabdian, insentif, tambahan penghasilan PNS, dll), Belanja Modal (bunga utang pinjaman, bunga utang obligasi, dll), Belanja Hibah (belanja hibah kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah desa, dll), Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga.

- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi Belanja Pegawai (honorarium, uang lembur, dll), Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal (pengadaan tanah, pengadaan alat berat, pengadaan konstruksi, pengadaan buku, dll).

Dari pengertian yang telah dijelaskan, belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran yang merupakan tanggungjawab terhadap pemerintah pusat dan penduduk di daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah tersebut. Terdapat dua penelitian mengenai belanja daerah yang populasinya adalah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu Ulum (2005) serta Aprilla dan Saputra (2013). Penelitian yang lain pada umumnya menggunakan Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi saja.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi (Adisasmita, 2011:175). Mekanisme penghitungan DAU yaitu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan

pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan mempertimbangkan pertimbangan DPOD tersebut. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penyusunan RAPBN (www.wikiapbn.com).

Menurut UU No 33 tahun 2004, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetap kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAU menurut Adisasmitha (2011:176) ini merupakan seluruh alokasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan DAU akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi
- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Menurut PP No 55 Tahun 2005, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Apabila belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen DAU yaitu Abdullah dan Halim (2003), Ulum (2005), Sasana (2011), Aprilla dan Saputra (2013), Segoro dan Pratiwi (2014), Sari dan Indrajaya (2014), Devita, Delis, dan Junaidi (2014), Putra dan Dwirandra (2015), serta Puspitasari (2015). Semua penelitian mengatakan pengaruh DAU terhadap belanja daerah positif signifikan.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Adisasmita, 2011:55). Menurut Renyowijoyo (2010:174), DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

- a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional;
- b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 bahwa DAK dimaksudkan untuk membiayai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, contohnya kebutuhan saluran irigasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, dan lain-lain (Putra dan Dwirandra, 2015).

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran yang bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan penghitungan DAK dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria. Kriteria DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum yaitu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis (UU No. 33 Tahun 2004).

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen DAK yaitu Ulum (2005), Sasana (2011), Sari dan Indrajaya (2014), Segoro dan Pratiwi (2014), serta Putra dan Dwirandra (2015). Dari penelitian-penelitian tersebut masih ditemukannya *gap* penelitian satu dengan yang lainnya.

6. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (UU No 33 tahun 2004). Menurut Renyowijoyo (2010:173-174), Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan;
- b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan;
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (HPH), provisi sumber daya hutan (PDSH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan wilayah daerah yang bersangkutan.

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan melihat rencana penerimaan PBB, BPHTB, dan PPh paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran. Penerimaan Pajak berasal dari PBB, BPHTB, dan PPh pasal 25, 29, dan 21. Penerimaan Negara dari PBB dibagi menjadi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Sedangkan penerimaan Negara dari BPHTB dibagi menjadi 20% untuk pemerintah

pusat dan 80% untuk daerah. Untuk PPh, penerimaannya dibagi menjadi 20% pemerintah daerah.

Alokasi DBH sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri teknis berdasarkan perhitungan paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Penerimaan sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Untuk sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, dan pertambangan panas bumi persentasenya adalah 20% pemerintah pusat dan 80% pemerintah daerah. Sektor pertambangan minyak bumi persentase pembagiannya sebesar 15% untuk pemerintah daerah. Sedangkan sektor pertambangan gas bumi sebesar 30% untuk pemerintah daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen DAK yaitu Ulum (2005), Sasana (2011), Sari dan Indrajaya (2014), dan Putra dan Dwirandra (2015). Rata-rata hasilnya signifikan positif, namun pada penelitian Ulum, Sasana, serta Sari dan Indrajaya, ketiga penelitian tersebut menggabungkan DAU, DAK, dan DBH ke dalam variabel Dana Perimbangan.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan

dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya (Sasana, 2011). PAD yakni penerimaan yang dihasilkan daerah melalui pemungutan yang berdasarkan pada tata tertib daerah yang berlandaskan pada tatanan perundang-undangan (Sari dan Indrajaya, 2014).

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Menurut Mardiasmo (2002:140), sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah menurut UU No. 33 tahun 2004 meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

PAD menunjukkan kemandirian dari suatu daerah. PAD merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar PAD yang

didapatkan secara mandiri, maka daerah tersebut tidak harus tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat (Putra dan Dwirandra, 2013).

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen PAD yaitu Abdullah dan Halim (2003), Ulum (2005), Aprilla dan Saputra (2013), Segoro dan Pratiwi (2014), Sari dan Indrajaya (2014), Devita, Delis, dan Junaidi (2014), Putra dan Dwirandra (2015), serta Puspitasari (2015). Semua penelitian mengatakan pengaruh PAD terhadap belanja daerah positif signifikan.

8. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan imigrasi (Said Rusli, 2012). Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2014:74).

Penduduk merupakan subjek pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar memerlukan anggaran yang semakin besar

(Sasana, 2011). Selain menjadi subjek pembangunan, penduduk dapat menjadi asset maupun beban dalam pembangunan suatu daerah. Apabila penduduk tersebut memiliki keahlian dan dapat meningkatkan produksi nasional, maka tergolong menjadi asset. Sedangkan apabila tidak memiliki keahlian dan banyak menuntut pelayanan sosial, maka tergolong menjadi beban (Devita, Delis, dan Junaidi, 2014)

Terdapat dua penelitian yang meneliti jumlah penduduk menjadi variabel dependen dan masih terdapat *gap* dari kedua penelitian tersebut. Pada penelitian Devita, Delis, dan Junaidi (2014), jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Sedangkan menurut penelitian Sasana (2011), jumlah penduduk berhubungan positif dan berpengaruh terhadap belanja daerah.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Judul, Penulis, Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung	Variabel Independen: X1: Dana Perimbangan X2: PAD Variabel	H1: Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah H2: PAD berpengaruh	Dana Perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

	Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya	Dependen: Y: Belanja Daerah	signifikan terhadap belanja daerah	
	e-journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 3, No. 10: 452-459 Oktober 2014 ISSN: 2303-0178			
2	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Dwi Putra dan A. A. N. B.	Variabel Independen: X1: DAU X2: DBH X3: DAK X4: PAD Variabel Dependen:	H1: DAU berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali H2: DAK berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di	DAU, DBH, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Tidak terjadi fenomena

	<p>Dwirandra</p> <p>e-journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13, No. 3: 811- 827</p> <p>Desember 2015</p> <p>ISSN: 2302- 1018</p>	<p>Y: Belanja Daerah</p>	<p>Provinsi Bali</p> <p>H3: DBH berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali</p> <p>H4: PAD berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali</p> <p>H5: terdapat fenomena <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali</p>	<p>flypaper effect pada Provinsi Bali.</p>
3	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum</p>	<p>Variabel Independen: X1: PAD X2: DAU</p>	<p>H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</p>	<p>PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p>

	<p>Terhadap Belanja Daerah</p> <p>Puput Purpitasari</p> <p>Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11 2015</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Belanja Daerah</p>	<p>H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</p>	
4	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: PAD</p> <p>X2: DAU</p> <p>X3: Jumlah Penduduk</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Belanja</p>	<p>H1: PAD memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah</p> <p>H2: DAU memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah</p> <p>H3: jumlah penduduk</p>	<p>PAD dan DAU memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap belanja daerah.</p> <p>Sedangkan Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja daerah.</p>

	<p>Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi</p> <p>Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2, No.2</p> <p>Oktober- Desember 2014</p> <p>ISSN: 2338- 4603</p>	Daerah	memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah	
5	<p>Analisis atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia</p> <p>Ihyaul Ulum MD., SE</p>	<p>Variabel Independen: X: Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Y: Belanja Daerah</p>	<p>DP_{t-1} berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah_t</p>	<p>Dana perimbangan t-1 berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah t.</p>

	<p>Jurnal Humanity, Vol. 1, No. 1: 23-28 September 2005</p>			
6	<p>Pengaruh <i>Flypaper Effect</i>, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia</p> <p>Nila Aprilla dan Redo Arian Saputra</p> <p>Jurnal Akuntansi Vol. 3, No. 2:107- 132 (2013)</p>	<p>Variabel Independen: X1: DAU X2: PAD</p> <p>Variabel Dependen: Y: Belanja Daerah</p>	<p>H1: Pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah</p> <p>H2: pengaruh DAU- 1 terhadap belanja daerah t lebih besar daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja daerah t</p> <p>H3: daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami <i>flypaper effect</i></p>	<p>DAU berpengaruh lebih besar terhadap belanja daerah daripada PAD terhadap belanja daerah. DAU tahun t-1 tidak berpengaruh lebih besar daripada PAD tahun t-1 terhadap belanja daerah tahun t. Terdapat fenomena <i>flypaper effect</i>.</p>

7	<p><i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia</p> <p>Hadi Sasana</p> <p>Jurnal Eko-Regional, Vol. 5 No.2</p> <p>September 2010</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: DAU</p> <p>X2: DBH</p> <p>X3: PAD</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Belanja Daerah</p>	<p>H1: DAU memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah</p> <p>H2: DBH memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah</p> <p>H3: PAD memiliki hubungan signifikan positif terhadap belanja daerah</p> <p>H4: terjadi <i>flypaper effect</i> di Provinsi di Indonesia 2005-2008</p>	<p>DAU, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.</p> <p>Ditemukan <i>flypaper effect</i> dalam anggaran pemerintah provinsi.</p>
8	<p>Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: dana perimbangan</p> <p>X2: PAD</p> <p>X3: DPRB</p> <p>X4: Jumlah</p>	<p>H1: Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>H2: PAD</p>	<p>PDRB rill, dana perimbangan, jumlah penduduk berhubungan positif signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>Sedangkan PAD tidak</p>

	<p>Desentralisasi Fiskal</p> <p>Hadi Sasana</p> <p>Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 2011. Vol. 18, No. 1: 46-58</p> <p>ISSN: 1412-3126</p>	<p>Penduduk</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Belanja Daerah</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>H3: PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.</p>
--	--	---	---	---

Tabel II.1

Hasil Penelitian yang Relevan

Sumber: Data diolah oleh Penulis 2017

C. Kerangka Teoritik

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pihak yang memberi wewenang) kepada agen (pihak lain) untuk mengambil keputusan. Selain itu, dijelaskan bahwa prinsipal mengontrak agen untuk mengelola sumber daya perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan terjadi di berbagai organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Berlakunya otonomi daerah di Indonesia, melahirkan asas desentralisasi. Dengan adanya asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah (agen) memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus urusan daerah dan mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk menentukan belanja daerah yang terjadi dalam satu periode anggaran.

Dalam teori ini dijelaskan juga terdapat perbedaan antara keputusan yang diambil oleh agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Hal ini dibuktikan dengan kasus tingginya belanja pegawai yang merupakan salah satu bagian belanja daerah. Tingginya belanja pegawai mengakibatkan persentase belanja yang lain seperti belanja modal dan infrastruktur sedikit. Perlu adanya peningkatan kualitas belanja daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah yang juga akan meningkatkan perekonomian Negara.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah, diantaranya yaitu DAU, DAK, DBH, PAD, dan Jumlah Penduduk.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin tinggi DAU yang didapat, maka semakin tinggi pula belanja daerah. Hal ini dikarenakan DAU merupakan salah satu bentuk pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin tinggi DAK, semakin tinggi pula belanja daerah. Hal ini dikarenakan DAK merupakan pendapatan yang didapatkan dari transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. DAK bertujuan untuk membiayai keperluan daerah yang menjadi prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan di daerah terpencil.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Semakin tinggi DBH, maka semakin tinggi belanja daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah tersebut meningkat dan dapat digunakan untuk belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja daerah. Hal ini dikarenakan apabila suatu daerah dapat menggali potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan daerah tersebut, maka akan menambah jumlah pendapatan dan dapat digunakan untuk belanja daerah.

Selain itu, belanja daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk belanja daerah. Hal ini dikarenakan penduduk bisa menjadi aset atau beban pada suatu daerah. Dikatakan aset apabila penduduk tersebut produktif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Namun, dikatakan beban apabila penduduk tersebut tidak produktif dan hanya menuntut infrastruktur dan pelayanan yang tinggi.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka peneliti menggambarkan dalam bagan seperti berikut:



Sumber: Data diolah oleh Penulis 2017

Gambar II.2
Kerangka Teoritik

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang relevan dan kerangka teoritik yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

DAU, DAK, dan DBH merupakan bagian dari dana perimbangan. DAU bertujuan untuk memberikan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan (Purpitasari, 2015). DAU merupakan faktor pemerataan kapasitas fiskal, hal ini dikarenakan besaran DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*)(UU No. 33 Tahun 2004).

DAU sebagai transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (Putra dan Dwirandra, 2015). Sesuai dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), Sasana (2010) , Aprilla dan Saputra (2013), Segoro dan Pratiwi (2014), Devita, Delis, dan Junaidi (2014), Purpitasari (2015), Putra dan Dwirandra (2015), DAU memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Bagian dari dana perimbangan yang kedua adalah DAK. Perbedaan DAK dengan DAU dan DBH yaitu adanya tujuan khusus yang berbeda dari daerah lain. DAK dialokasikan kepada daerah dalam rangka

pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010:174). Contoh kegiatan khusus yaitu kebutuhan saluran irigasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, pembangunan jembatan, dan lain-lain.

Meningkatnya jumlah DAK yang diberikan akan meningkatkan belanja daerah. Penelitian Putra dan Dwirandra (2015) menyatakan DAK memiliki hasil positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah. Namun adapula penelitian yang menyatakan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah yaitu penelitian Segoro dan Pratiwi (2014). Menurut Segoro dan Pratiwi (2014) DAK tidak berpengaruh signifikan karena DAK merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan khusus yang bersifat darurat.

Bagian dari dana perimbangan yang ketiga yaitu DBH. DBH merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Apabila transfer DBH meningkat, diharapkan belanja daerah pun meningkat juga. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan daerah bertambah sehingga dana untuk mencukupi pengeluaran daerah pada periode anggaran tertentu pun ikut bertambah. Putra dan Dwirandra (2015) serta Sasana (2010)

menggunakan DBH menjadi variabel dependen dan hasilnya berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1a: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H1b: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H1c: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah

2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah, baik dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. PAD merupakan tolok ukur kemandirian daerah (Purpitasari, 2015). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan berlakunya desentralisasi, maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah (Putra dan Dwirandra, 2015).

Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi alokasi belanja daerah, hal ini karena PAD merupakan unsur pemasukan bagi daerah guna membayar seluruh beban dalam suatu periode anggaran. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang positif antara PAD dan belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), Sasana (2010), Sari dan Indrajaya (2014), Segoro dan Pratiwi (2014), serta sejumlah penelitian lainnya menyatakan PAD berhubungan positif signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah, maka akan berdampak pada tingginya belanja daerah tersebut. Hal ini dikarenakan akan semakin tingginya tuntutan dari masyarakat setempat mengenai fasilitas dan pelayanan dari pemerintah daerahnya. Hubungan jumlah penduduk juga erat dengan pembangunan daerahnya. Apabila banyak penduduk yang produktif, maka perekonomian daerah tersebut akan menjadi lebih baik yang dengan kata lain penduduk tersebut yang membantu dalam hal pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk

harus dikendalikan (Sasana, 2011). Sasana (2011) melakukan penelitian jumlah penduduk terhadap belanja daerah dan hasilnya menyatakan adanya hubungan positif. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan fakta dan bukti empiris terkait dengan hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah
2. Memberikan fakta dan bukti empiris terkait dengan hubungan antara DAK dengan Belanja Daerah
3. Memberikan fakta dan bukti empiris terkait dengan hubungan antara DBH dengan Belanja Daerah
4. Memberikan fakta dan bukti empiris terkait dengan hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah
5. Memberikan fakta dan bukti empiris terkait dengan hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Belanja Daerah

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Laporan Realiasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.

C. Metode Penelitian

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda melalui program SPSS yang dilakukan secara serentak terhadap kelima variabel independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:119). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi. Periode waktu penelitian adalah tahun 2011-2015.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:120), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:126). Kriteria provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2011-2015
- b. Provinsi yang telah mempublikasikan dengan lengkap LKPD dan telah diaudit oleh BPK tahun 2011-2015

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:39).

a. Definisi Konseptual

Belanja daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Mardiasmo, 2002:185).

b. Definisi Operasional

Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007:39).

2.1 Dana Alokasi Umum

a. Definisi Konseptual

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi (Adisasmita, 2011:175).

b. Definisi Operasional

Menurut PP No. 55 tahun 2005, total dana DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk provinsi ditetapkan 10% dan untuk kabupaten/kota 90% (Aprilla dan Saputra, 2013).

2.2 Dana Alokasi Khusus

a. Definisi Konseptual

DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pedanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010:174).

b. Definisi Operasional

Penghitungan DAK dalam PP No 55 Tahun 2005 melalui dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK (kriteria umum, khusus, dan teknis) dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah (perhitungan indeks kriteria umum, khusus, dan teknis). Setiap daerah yang menerima DAK, wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran DAK yang diterimanya.

Kriteria umum merupakan kemampuan keuangan daerah yang dapat dihitung melalui indeks fiskal netto. Kriteria khusus merupakan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah yang dihitung melalui indeks kewilayahan. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.3 Dana Bagi Hasil

a. Definisi Konseptual

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Fauzi dan Hasanah, 2015:34).

b. Definisi Operasional

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Oleh karena itu, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

2.4 Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Konseptual

PAD adalah penerimaan yang dihasilkan daerah melalui pemungutan yang berdasarkan pada tata tertib daerah yang berlandaskan pada tatanan perundang-undangan (Sari dan Indrajaya, 2014).

b. Definisi Operasional

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:158). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan:

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Hasil Retribusi Daerah} + \text{Hasil Perusahaan Milik Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

2.5 Jumlah Penduduk

a. Definisi Konseptual

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Statistik Indonesia, 2014:74)

b. Definisi Operasional

Total penduduk per provinsi menyatakan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing provinsi di Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif, disajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase (Sugiyono, 2014:199).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik apabila data variabel bebas dan terikat berdistribusi normal (Sunyoto, 2011:84). Pengujian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov. Normalitas data dapat dilihat melalui besarnya *asymptotic significance*. Apabila *asymptotic significance* besarnya lebih dari 5% maka data terdistribusi normal (Purpitasari, 2015).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas $> 0,5$. Sedangkan jika koefisien korelasi antarvariabel bebas $< 0,5$ maka tidak terjadi

multikolinearitas. Selain itu, untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas juga dapat menggunakan cara lain yaitu dengan nilai *tolerance* (α) dan VIF.

Nilai *tolerance* (α) adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Besarnya nilai *tolerance* dapat dihitung dengan $1/\text{VIF}$. Sedangkan nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Besarnya nilai VIF dihitung dengan $1/\alpha$.

Apabila nilai *tolerance* (α) hitung $< \alpha$ dan VIF hitung $> \text{VIF}$ maka variabel bebas mengalami multikolinieritas. Sedangkan jika α hitung $> \alpha$ dan VIF hitung $< \text{VIF}$ maka variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas (Sunyoto, 2011:79-80).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui sama atau tidak varians dari residual dari residual dari observasi satu dengan yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama maka disebut homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama maka disebut heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis uji heterokedastisitas dilakukan melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y). Heterokedastisitas terjadi jika pada

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang (Sunyoto, 2011:82-83).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t dan kesalahan pengganggu periode $t-1$. Dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Durbin Watson* (Sunyoto, 2011:91-92). Adapun ketentuan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$
- b. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
- c. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW diatas +2 atau $DW > +2$.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh DAU, DAK, DBH, PAD, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Analisis regresi bertujuan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Purpitasari, 2015). Model yang digunakan adalah:

$$BD = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 DBH + \beta_4 PAD + \beta_5 JP + e$$

Dalam hal ini:

BD	: Belanja Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
JP	: Jumlah Penduduk
e	: <i>disturbance error</i>

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Kriteria uji F adalah apabila nilai $F > F_{tabel}$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen diterima. Selain itu dapat juga diukur dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2001:44-45).

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2001:44). Kriteria uji t adalah apabila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 dapat ditolak apabila nilai $t > 2$ (dalam nilai absolute). Dengan kata lain hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga diukur dengan cara membandingkan nilai statistik t hitung dengan t tabel. Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima (Ghozali, 2001:44).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menguji seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001:45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diperoleh dari BPK dan Statistik Indonesia yang diperoleh dari BPS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2011-2015. Peneliti menggunakan belanja daerah sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan JP (Jumlah Penduduk).

Populasi yang digunakan berjumlah 34 provinsi. Metode pemilihan sampel yang digunakan Peneliti adalah metode *purposive sampling*, berikut adalah kriterianya:

- a. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2011-2015
- b. Provinsi yang telah mempublikasikan dengan lengkap LKPD dan telah diaudit oleh BPK tahun 2011-2015

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah provinsi yang memenuhi syarat adalah 31 provinsi. Oleh karena itu, jumlah observasi yang didapat adalah 155 (31x5) observasi. Seleksi pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Seleksi Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah provinsi di Indonesia	34
2.	Provinsi yang tidak ada di Indonesia tahun 2011-2015	(1)
3.	Provinsi yang tidak mempublikasikan dengan lengkap LKPD dan telah diaudit oleh BPK tahun 2011-2015	(2)
	Jumlah Sampel	31
	Jumlah observasi selama 5 tahun (2011-2015)	155

Sumber: data diolah oleh penulis (2017)

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, *range*, standar deviasi, varian dari variabel dependen dan independen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln Belanja Daerah	155	27,23	30,36	28,6859	,73247
Ln DAU	155	26,66	28,45	27,5335	,33938
Ln DAK	155	23,49	26,86	24,6710	,54577
Ln DBH	155	23,76	28,85	26,2903	1,20384
Ln PAD	155	25,16	30,41	27,7785	1,15091

Ln JP	155	13,57	17,66	15,2373	1,00932
Valid N (listwise)	155				

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Tabel IV.2 memberikan informasi mengenai masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Penjelasan dari hasil perhitungan analisis statistik deskriptif yaitu:

2.1 Belanja Daerah

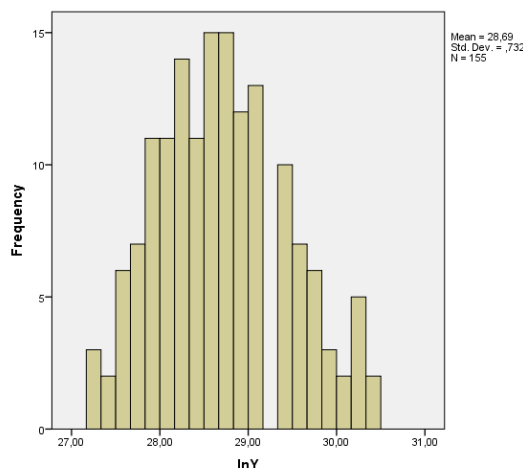
Belanja daerah ditransformasi menggunakan log normalitas dari total belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga di suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 28,635 dengan anti ln Rp 2.729.119.102.559 dengan standar deviasi 0,73247 dengan anti ln 2,080. Standar deviasi belanja daerah lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data belanja daerah relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Belanja daerah maksimal atau tertinggi sebesar 30,36 merupakan daerah Jawa Barat tahun 2014 dengan anti ln Rp 15.336.449.436.973. Sedangkan belanja daerah minimum atau terendah 27,23 adalah Gorontalo tahun 2011 dengan anti ln Rp 668.200.748.748. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram belanja daerah:

Tabel IV.3
Distribusi Frekuensi Belanja Daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	27,23-27,58	6	3,9	3,9	3,9
	27,59-27,94	19	12,3	12,3	16,1
	27,95-28,30	25	16,1	16,1	32,3
	28,31-28,66	30	19,4	19,4	51,6
	28,67-29,02	31	20,0	20,0	71,6
	29,03-29,38	15	9,7	9,7	81,3
	29,39-29,74	14	9,0	9,0	90,3

	29,75-30,10	8	5,2	5,2	95,5
	30,11-30,46	7	4,5	4,5	100,0
	Total	155	100,0	100,0	

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.1

Grafik Histogram Belanja Daerah

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.3, dapat diketahui bahwa rentang skor belanja daerah (r) adalah sebesar 3,13. Banyaknya kelas (k) pada belanja daerah yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval belanja daerah adalah sebesar 0,35. Frekuensi belanja daerah tertinggi berada diantara 28,67 dan 29,02 dengan jumlah 31 data. Sedangkan frekuensi belanja daerah terendah berada diantara 27,23 dan 27,58 dengan jumlah 6 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam belanja daerah juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.1). Rata-rata belanja daerah adalah 28,635 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 50 data (32,26%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 105 data (67,74%).

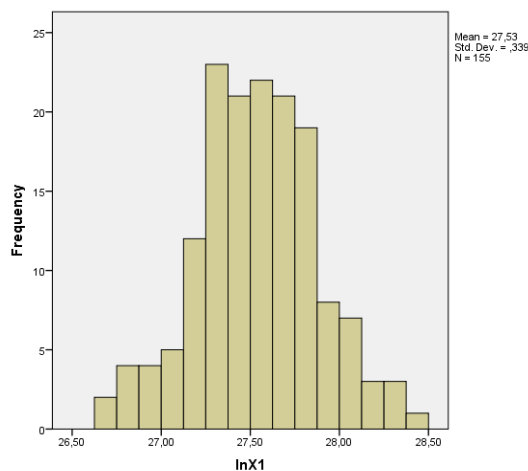
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU ditransformasi menggunakan log normalitas dari total DAU di suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 27,5447 dengan anti ln Rp 917.299.624.401 dengan standar deviasi 0,33938 dengan anti ln 1,404. Standar deviasi DAU lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data DAU relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Jumlah DAU maksimal atau tertinggi sebesar 28,45 merupakan daerah Papua tahun 2015 dengan anti ln Rp 2.277.932.698.000. Sedangkan DAU minimum atau terendah 26,66 adalah Riau tahun 2011 dengan anti ln Rp 380.051.123.500. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram DAU:

Tabel IV.4
Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Umum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26,66-26,86	6	3,9	3,9	3,9
	26,87-27,07	7	4,5	4,5	8,4
	27,08-27,28	24	15,5	15,5	23,9
	27,29-27,49	34	21,9	21,9	45,8
	27,50-27,70	36	23,2	23,2	69,0
	27,71-27,91	31	20,0	20,0	89,0
	27,92-28,12	10	6,5	6,5	95,5
	28,13-28,33	6	3,9	3,9	99,4
	28,34-28,54	1	,6	,6	100,0
Total		155	100,0	100,0	

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.2
Grafik Histogram DAU

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.4, dapat diketahui bahwa rentang skor DAU (r) adalah sebesar 1,79. Banyaknya kelas (k) pada DAU yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval DAU adalah sebesar 0,20. Frekuensi DAU tertinggi berada diantara 27,50 dan 27,70 dengan jumlah 36 data. Sedangkan frekuensi DAU terendah berada diantara 28,34 dan 28,54 dengan jumlah 1 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam DAU juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.2). Rata-rata DAU adalah 27,5447 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 48 data (31%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 107 data (69%).

2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

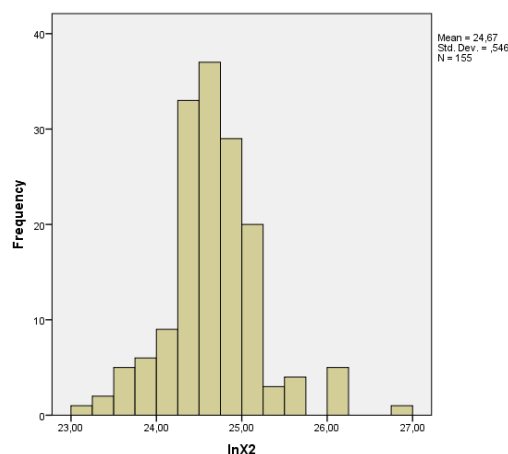
DAK ditransformasi menggunakan log normalitas dari total DAK pada suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 24,6975 dengan anti ln Rp 53.209.351.611 dengan standar

deviasi 0,54577 dengan anti ln 1,726. Standar deviasi DAK lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data DAK relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Jumlah DAK maksimal atau tertinggi sebesar 26,86 merupakan daerah Papua tahun 2015 dengan anti ln Rp 460.303.520.000. Sedangkan DAK minimum atau terendah 23,08 adalah Banten tahun 2013 dengan anti ln Rp 10.601.213.000. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram DAK:

Tabel IV.5
Distribusi Frekuensi Dana Alokasi Khusus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23,08-23,50	3	1,9	1,9	1,9
	23,51-23,93	9	5,8	5,8	7,7
	23,94-24,36	22	14,2	14,2	21,9
	24,37-24,79	64	41,3	41,3	63,2
	24,80-25,22	43	27,7	27,7	91,0
	25,23-25,65	7	4,5	4,5	95,5
	25,66-26,08	1	,6	,6	96,1
	26,09-26,51	5	3,2	3,2	99,4
	26,52-26,94	1	,6	,6	100,0
Total		155	100,0	100,0	

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.3
Grafik Histogram DAK

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.5, dapat diketahui bahwa rentang skor DAK (r) adalah sebesar 3,78. Banyaknya kelas (k) pada DAK yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval DAK adalah sebesar 0,42. Frekuensi DAK tertinggi berada diantara 24,37 dan 24,79 dengan jumlah 64 data. Sedangkan frekuensi DAK terendah terdapat di 2 kelas yaitu diantara 25,66 dan 26,08 serta 26,52 dan 26,94 sebanyak masing-masing 1 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam DAK juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.3). Rata-rata DAK adalah 24,6975 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 57 data (36,6%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 98 data (63,4%).

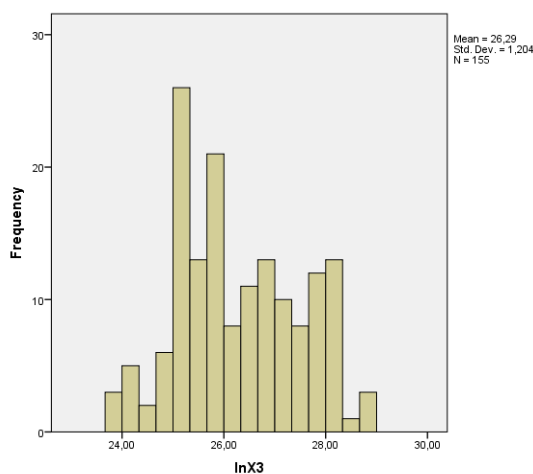
2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH ditransformasi menggunakan log normalitas dari total DBH yang bersumber dari sumber daya alam dan pajak di suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 26,229 dengan anti ln Rp 246.148.290.949 dengan standar deviasi 1,20384 dengan anti ln 3,333. Standar deviasi DBH lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data DBH relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Jumlah DBH maksimal atau tertinggi sebesar 28,85 merupakan daerah Riau tahun 2014 dengan anti ln Rp 3.367.086.539.743 Sedangkan DBH minimum atau terendah 23,76 adalah Gorontalo tahun 2015 dengan anti ln Rp 20.766.583.149. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram DBH:

Tabel IV.6
Distribusi Frekuensi Dana Bagi Hasil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23,76-25,00	8	5,2	5,2	5,2
	25,01-25,58	5	3,2	3,2	8,4
	25,59-26,16	35	22,6	22,6	31,0
	26,17-26,74	29	18,7	18,7	49,7
	26,75-27,32	18	11,6	11,6	61,3
	27,33-27,90	22	14,2	14,2	75,5
	27,91-28,48	14	9,0	9,0	84,5
	28,49-29,06	20	12,9	12,9	97,4
	29,07-29,64	4	2,6	2,6	100,0
Total	155	100,0	100,0		

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.4
Grafik Histogram DBH

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.6, dapat diketahui bahwa rentang skor DBH (r) adalah sebesar 5,09. Banyaknya kelas (k) pada DBH yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval DAK adalah sebesar 0,57. Frekuensi DBH tertinggi berada diantara 25,59 dan 26,16 dengan jumlah 35 data. Sedangkan frekuensi DBH terendah berada diantara 29,07 dan 29,64 dengan jumlah 4 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam DBH juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.4). Rata-rata DBH

adalah 26,229 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 78 data (50,3%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 77 data (49,7%).

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

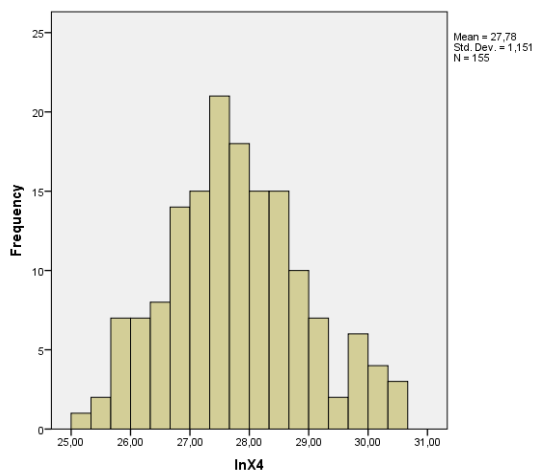
PADditransformasi menggunakan log normalitas dari total PAD di suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 27,733 dengan anti ln Rp 1.107.360.088.545 dengan standar deviasi 1,15091 dengan anti ln 3,161. Standar deviasi PAD lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data PAD relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Jumlah PAD maksimal atau tertinggi sebesar 30,41 merupakan daerah Jawa Barat tahun 2015 dengan anti ln Rp 16.032.856.414.345. Sedangkan PAD minimum atau terendah 25,16 adalah Maluku Utara tahun 2011 dengan anti ln Rp 84.773.698.195,70. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram PAD:

Tabel IV.7

Distribusi Frekuensi Pendapatan Asli Daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25,16-25,74	4	2,6	2,6	2,6
	25,75-26,33	14	9,0	9,0	11,6
	26,34-26,92	16	10,3	10,3	21,9
	26,93-27,51	29	18,7	18,7	40,6
	27,52-28,10	32	20,6	20,6	61,3
	28,11-28,69	29	18,7	18,7	80,0
	28,70-29,28	16	10,3	10,3	90,3
	29,29-29,87	5	3,2	3,2	93,5
	29,88-30,46	10	6,5	6,5	100,0
	Total	155	100,0	100,0	

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.5
Grafik Histogram PAD

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.7, dapat diketahui bahwa rentang skor PAD (r) adalah sebesar 5,25. Banyaknya kelas (k) pada DBH yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval DAK adalah sebesar 0,58. Frekuensi PAD tertinggi berada diantara 27,52 dan 28,10 dengan jumlah 32 data. Sedangkan frekuensi PAD terendah berada diantara 25,16 dan 25,74 dengan jumlah 4 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam DBH juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.5). Rata-rata DBH adalah 27,733 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 60 data (38,7%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 95 data (61,3%).

2.6 Jumlah Penduduk (JP)

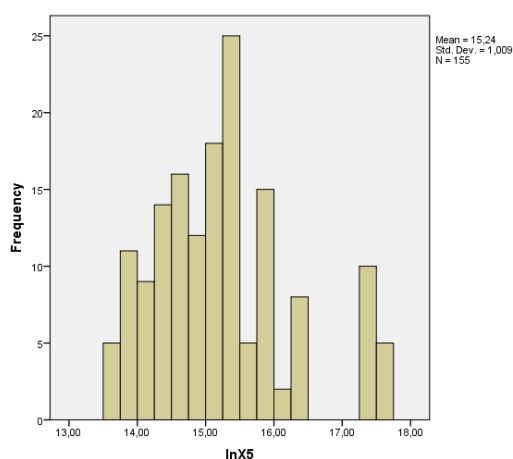
Jumlah penduduk ditransformasi menggunakan log normalitas dari total jumlah penduduk di suatu provinsi. Dari pengujian statistik deskriptif diperoleh rata-rata (*mean*) sebesar 15,1972 dengan anti ln

3.981.623 dengan standar deviasi 1,00932 dengan anti ln 2,744. Standar deviasi jumlah penduduk lebih rendah dari mean dan hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data jumlah penduduk relatif baik dan terdapat variasi dalam data. Jumlah penduduk maksimal atau tertinggi sebesar 17,66 merupakan daerah Jawa Barat tahun 2015 dengan anti ln 46.668.214 Sedangkan jumlah penduduk minimum atau terendah 13,57 adalah Papua Barat tahun 2011 dengan anti ln 786.000. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram jumlah penduduk:

Tabel IV.8
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13,57-14,02	17	11,0	11,0	11,0
	14,03-14,48	22	14,2	14,2	25,2
	14,49-14,94	25	16,1	16,1	41,3
	14,95-15,40	36	23,2	23,2	64,5
	15,41-15,86	18	11,6	11,6	76,1
	15,87-16,32	17	11,0	11,0	87,1
	16,33-16,78	5	3,2	3,2	90,3
	17,25-17,70	15	9,7	9,7	100,0
Total		155	100,0	100,0	

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*



Gambar IV.6
Grafik Histogram Jumlah Penduduk
Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.8, dapat diketahui bahwa rentang skor jumlah penduduk (r) adalah sebesar 4,09. Banyaknya kelas (k) pada DBH yaitu 9 dengan perhitungan $1 + 3,3 \log 155$. Interval DAK adalah sebesar 0,45. Frekuensi jumlah penduduk tertinggi berada diantara 14,95 dan 15,40 dengan jumlah 36 data. Sedangkan frekuensi jumlah penduduk terendah berada diantara 16,33 dan 16,78 dengan jumlah 5 data. Frekuensi terendah dan tertinggi dalam jumlah penduduk juga dapat dilihat melalui grafik histogramnya (Gambar IV.6). Rata-rata jumlah penduduk adalah 15,1972 sehingga jumlah frekuensi yang berada diatas rata-rata adalah 55 data (35,5%) sedangkan yang dibawah rata-rata adalah 100 data (64,5%).

B. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila nilai residual tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2013:154). Pengujian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov yang normalitasnya dilihat melalui besarnya *asymptotic significance*. Apabila *asymptotic significance* besarnya lebih dari 5% maka data terdistribusi normal. Dengan menggunakan data murni berdasarkan LKPD dan statistik Indonesia, menghasilkan nilai *asymptotic significance* sama dengan 5%. Hal ini

berarti data tidak berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal dapat ditransformasi menjadi normal. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram data maka kita dapat menentukan bentuk transformasinya (Ghozali, 2013:34).

Bentuk grafik histogram dari data dalam penelitian ini adalah *substantial positive skewness* oleh karena itu bentuk transformasi yang cocok adalah log10 atau LN. Peneliti memilih mentransformasi data dengan LN. Setelah ditransformasi, untuk mendapatkan normalitas data langkah selanjutnya adalah mendeteksi adanya data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada empat penyebab outlier, yaitu: (1) kesalahan dalam meng-entri data, (2) gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program computer, (3) outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, dan (4) outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:41).

Pertama-tama peneliti menguji normalitas data terhadap data sebelum melakukan outlier, hasilnya menunjukkan asymp.sig sebesar 0,05. Setelah itu, peneliti melakukan uji outlier pertama. Dari hasil uji outlier pertama, hasilnya menunjukkan data kelima (Provinsi Aceh) terdeteksi

outlier. Selanjutnya peneliti menghapus data tersebut dan melakukan uji ulang terhadap normalitas data. Hasil uji normalitas kedua menunjukkan asymp.sig sebesar 0,2. Selanjutnya, peneliti melakukan uji outlier lagi untuk memastikan apakah masih ada data yang terdeteksi outlier. Hasilnya data ke 70 (Provinsi Banten) terdeteksi outlier. Setelah itu, peneliti menghapus data tersebut dan melakukan uji normalitas. Hasil uji normalitas ketiga menunjukkan asymp.sig sebesar 0,2. Peneliti melakukan uji outlier lagi untuk memastikan apakah masih ada data yang terdeteksi outlier dan hasilnya menunjukkan tidak terdapat data outlier lagi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. Berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0320986
	Std. Deviation	,22083237
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,046
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil *asymptotic significance* adalah 0,200 (lebih dari 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menunjukkan data bebas dari multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10
Uji Multikolonieritas

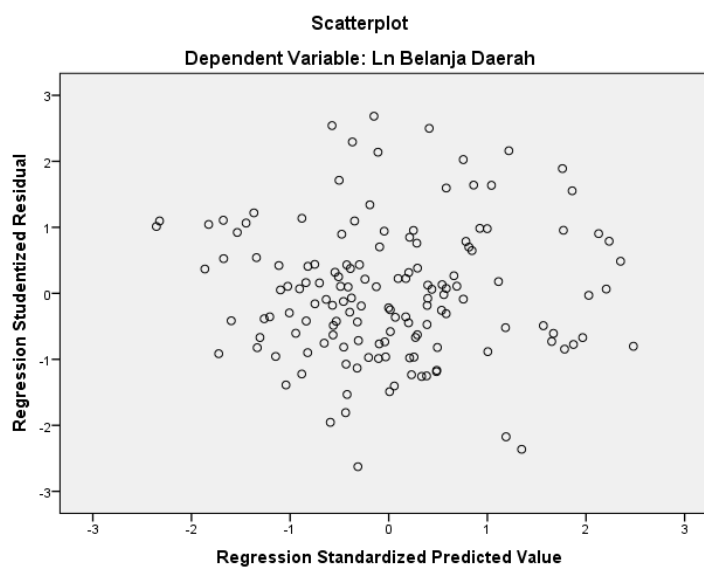
		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000		
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000	,426	2,349
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017	,573	1,745
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000	,593	1,685
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000	,120	8,335
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151	,128	7,836

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Tabel IV.10 menunjukkan nilai *tolerance* untuk DAU, DAK, DBH, PAD, dan JP > 0,10 dan VIF < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui sama atau tidak varians dari residual dari residual dari observasi satu dengan yang lain. Analisis uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui grafik *scatterplot*.



Gambar IV.7
Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t dan kesalahan pengganggu periode $t-1$. Dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Durbin Watson*. Berikut adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel IV.11
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,909	,906	,22174	1,297
a. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD					
b. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah					

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Adapun ketentuan tidak terjadi autokorelasi adalah apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$. Dari hasil tabel IV.11 yang menyatakan nilai Durbin-Watson adalah 1,297, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh DAU, DAK, DBH, PAD, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Berikut merupakan hasil dari regresi berganda:

Tabel IV.12
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan hasil tabel IV.12, dapat diketahui model regresi yang terbentuk antara DAU, DAK, DBH, PAD, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BD = -7,943 + 0,754 (DAU) + 0,113 (DAK) + 0,271(DBH) + 0,173 (PAD) + 0,073 (JP) + e}$$

Keterangan:

α	: konstanta
BD	: Belanja Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
JP	: Jumlah Penduduk
e	: <i>disturbance error</i>

Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan:

- Nilai konstanta sebesar -7,943, artinya jika semua variabel independen bernilai konstan, maka belanja daerah bernilai -7,943 atau Rp 0,0004.
- DAU memiliki nilai koefisien sebesar 0,754, artinya jika nilai variabel DAU mengalami kenaikan Rp 1 maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,754 atau sebesar Rp 2,1255. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi nilai DAU, maka kecenderungan untuk belanja pada suatu daerah akan semakin meningkat.

- c. DAK memiliki nilai koefisien sebesar 0,113, artinya jika nilai variabel DAK mengalami kenaikan Rp 1 maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,113 atau sebesar Rp 1,1196. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi nilai DAK, maka kecenderungan untuk belanja pada suatu daerah akan semakin meningkat.
- d. DBH memiliki nilai koefisien sebesar 0,271, artinya jika nilai variabel DBH mengalami kenaikan Rp 1 maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,271 atau sebesar Rp 1,3113. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi nilai DBH, maka kecenderungan untuk belanja pada suatu daerah akan semakin meningkat.
- e. PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,173, artinya jika nilai variabel PAD mengalami kenaikan Rp 1 maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,173 atau sebesar Rp 1,1889. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi nilai PAD, maka kecenderungan untuk belanja pada suatu daerah akan semakin meningkat.
- f. JP memiliki nilai koefisien sebesar 0,073, artinya jika nilai variabel JP mengalami kenaikan Rp 1 maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,073 atau sebesar Rp 1,0757. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi nilai JP, maka kecenderungan untuk belanja pada suatu daerah akan semakin meningkat.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Uji F diukur dengan membandingkan F tabel dan F hitung. Apabila F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berikut adalah hasil Uji F:

Tabel IV.13

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68,531	5	13,706	278,751	,000 ^b
	Residual	6,835	139	,049		
	Total	75,366	144			
a. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD						

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 278,751 dengan nilai signifikansi 0,000. Besarnya F tabel adalah 2,28. Oleh karena F hitung $>$ F tabel dan tingkat signifikansi $<$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DAU, DAK, DBH, PAD, dan JP secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

b. Uji t

Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila t hitung $>$ t tabel, maka

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel IV.14
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151

a. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan hasil uji t di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis 1a

DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Hal ini dikarenakan t hitung > t tabel ($8,984 > 1,97718$) dengan nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Oleh karena itu, H1a yang menyatakan DAU memiliki pengaruh terhadap belanja daerah **diterima**.

2) Pengujian Hipotesis 1b

DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Hal ini dikarenakan t hitung > t tabel ($2,423 > 1,97718$) dengan nilai signifikansi $0,017 (> 0,05)$. Oleh karena itu, H1b yang

menyatakan DAK memiliki pengaruh terhadap belanja daerah **diterima.**

3) Pengujian Hipotesis 1c

DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan t hitung $>$ t tabel ($13,634 > 1,97718$) dengan nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Oleh karena itu, H1c yang menyatakan DBH memiliki pengaruh terhadap belanja daerah **diterima.**

4) Pengujian Hipotesis 2

PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan t hitung $>$ t tabel ($3,776 > 1,97718$) dengan nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah **diterima.**

5) Pengujian Hipotesis 3

Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel ($1,444 < 1,97718$) dengan nilai signifikansi $0,151 (> 0,05)$. Oleh karena itu, H3 yang menyatakan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap belanja daerah **ditolak.**

c. Uji Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi menguji seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar $0 < R^2 < 1$. Nilai

R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel IV.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,909	,906	,22174	1,297
a. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD					
b. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah					

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Berdasarkan tabel IV.15, diperoleh nilai *adjusted R Square* 0,906 atau 90,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, PAD, dan jumlah penduduk mampu menjelaskan belanja daerah sebesar 90,6%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian ini.

C. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh DAU, DAK, DBH, PAD, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Persentase belanja daerah dengan penyerapan yang tertinggi adalah 99,50% yaitu Bali tahun 2014 dan persentase belanja daerah dengan penyerapan yang terendah adalah 31,33% yaitu Kalimantan Utara 2013.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hipotesis 1a berkaitan dengan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Data dari variabel independen ini ditransformasi menjadi Log Normalitas (Ln). Hipotesis 1a menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki t hitung lebih besar dari t tabel ($8,984 > 1,97718$) sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima atau variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai signifikansi dana alokasi umum adalah $0,000 (< 0,05)$. Hal ini menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian dana alokasi umum memiliki arah yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima pada suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja daerahnya. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hal ini pun sejalan dengan teori dana alokasi umum yang menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan salah satu komponen pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang berupa transfer dari pemerintah pusat guna meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan disuatu daerah. Terpenuhinya kebutuhan disuatu daerah bergantung dengan belanja daerahnya. Selain peningkatan pelayanan publik, dana alokasi umum juga berfungsi sebagai

pemerata kapasitas fiskal. Dasar pengalokasian dana alokasi umum bergantung pada celah fiskal suatu daerah. Apabila potensi fiskal kecil dan kebutuhan fiskalnya besar, maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif besar. Dengan adanya transfer dana alokasi umum yang besar dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya melalui belanja daerah. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana tersebut dengan proporsional untuk belanja daerahnya sehingga tidak terjadi ketimpangan diantara pos-pos belanjanya dan dapat memajukan daerah tersebut. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal besar dan kebutuhan fiskalnya kecil, maka dana alokasi umum yang diterima relatif kecil.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), Sasana (2010) , Aprilla dan Saputra (2013), Segoro dan Pratiwi (2014), Devita, Delis, dan Junaidi (2014), Purpitasari (2015), Putra dan Dwirandra (2015), serta Claudia (2016). Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan provinsi yang mendapatkan dana alokasi umum dalam jumlah yang tinggi akan mendukung pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah di provinsi yang bersangkutan.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hipotesis 1b berkaitan dengan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Data dari variabel independen ini ditransformasi menjadi Log

Normalitas (Ln). Hipotesis 1b menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil uji t (tabel IV.14) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, maka H1b diterima. Hasil pengujian dana alokasi khusus memiliki arah yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima pada suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja daerahnya. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan yang berupa transfer dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN guna membiayai kebutuhan tertentu, yaitu mendanai kegiatan khusus atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Contoh kegunaan dana alokasi khusus adalah pembangunan jembatan, pembangunan jalan di daerah terpencil, kebutuhan saluran irigasi, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Segoro dan Pratiwi (2014), Putra dan Dwirandra (2015), serta Claudia (2016) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut berarti DAK tidak mampu meningkatkan belanja daerah (Putra dan Dwirandra,

2015). Menurut Segoro dan Pratiwi (2014), DAK tidak berpengaruh dikarenakan DAK yang diterima pemerintah pusat untuk membiayai suatu kegiatan yang bersifat khusus terutama kepada daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hipotesis 1c berkaitan dengan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Data dari variabel independen ini ditransformasi menjadi Log Normalitas (Ln). Hipotesis 1c menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil uji t menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, maka H_{1c} diterima. Hasil pengujian dana bagi hasil memiliki arah yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi dana bagi yang diterima pada suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja daerahnya. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dana bagi hasil disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajak yang dibayar oleh masyarakat seperti PBB, BPHTB, dan PPh serta sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti penerimaan kehutanan, pertambangan umum, perikanan, dan pertambangan

akan meningkatkan penerimaan Negara. Semakin besar penerimaan yang diterima oleh negara dari sumber-sumber tersebut, maka semakin besar suatu daerah menerima dana bagi hasil yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana bagi hasil kepada daerah dilakukan berdasarkan persentase.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasana (2010), dan Putra dan Dwirandra (2015) yang juga menyatakan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis 2 berkaitan dengan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Data dari variabel independen ini ditransformasi menjadi Log Normalitas (Ln). Hipotesis 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, maka H2 diterima. Hasil pengujian pendapatan asli daerah memiliki arah yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menggambarkan semakin besar pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan maka semakin besar pula belanja daerah di suatu daerah. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Apabila suatu daerah dapat menggali potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan daerah tersebut, maka akan menambah jumlah pendapatan dan dapat digunakan untuk belanja daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merepresentasikan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan oleh suatu provinsi maka semakin mandiri suatu provinsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen PAD yaitu Abdullah dan Halim (2003), Ulum (2005), Aprilla dan Saputra (2013), Segoro dan Pratiwi (2014), Sari dan Indrajaya (2014), Devita, Delis, dan Junaidi (2014), Putra dan Dwirandra (2015), serta Puspitasari (2015) yang mengatakan pengaruh PAD terhadap belanja daerah positif signifikan.

Sedangkan dengan penelitian Sasana (2011), hasil penelitian ini bertentangan. Sasana (2011) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan relatif kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja di masing-masing daerah kabupaten/kota yang beliau teliti yaitu Jawa Barat 2004-2008.

5. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Hipotesis 3 berkaitan dengan jumlah terhadap belanja daerah. Data dari variabel independen ini ditransformasi menjadi Log Normalitas (Ln). Hipotesis 3 menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil uji t (tabel IV.14) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki t hitung lebih kecil dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, maka H3 ditolak.

Hasil ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja daerah di suatu provinsi. Jumlah penduduk artinya bukan salah satu faktor penting dalam menentukan belanja daerah. Banyaknya penduduk tidak berarti juga semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk belanja. Hal ini berarti kecenderungan belanja daerah bergantung kepada besaran pendapatan yang didapat oleh suatu provinsi. Berikut adalah pembuktian dari hipotesis 3:

Tabel IV.16
Pembuktian Hipotesis 3

Tahun	Provinsi	Jumlah Penduduk	Belanja Daerah
2011	Banten	10.943.800	2.885.149.177.616,00
2012	Banten	11.198.600	4.140.076.262.914,00
2013	Banten	11.452.500	3.960.865.642.094,00
2014	Banten	11.704.900	6.192.155.567.940,00
2015	Banten	11.934.373	5.505.735.078.498,00

Sumber: data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.16 Provinsi Banten periode 2011-2015 menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk di provinsi tersebut maka belum tentu semakin tinggi pula belanja daerah pada provinsi tersebut. Kenaikan dan penurunan belanja daerah tidak sesuai dengan kenaikan atau penurunan dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh tinggi rendahnya belanja daerah bergantung kepada kebutuhan dan jumlah pendapatan yang ada pada suatu provinsi. Sebagai contoh, apabila penduduk dalam suatu daerah banyak namun tidak produktif, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk hanya sebagai beban dan akibatnya daerah tersebut hanya akan menggantungkan jumlah belanjanya berdasarkan dana transfer.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Devita, Delis, dan Junaidi (2014), jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Menurut Devita, Delis, dan Junaidi (2014), pemerintah daerah masih bergantung secara keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya. Sehingga dapat disimpulkan pertambahan jumlah penduduk dapat mengurangi belanja langsung, dikarenakan proporsi DAU yang cenderung digunakan untuk belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai. Alokasi belanja langsung khususnya belanja modal dan belanja barang dan jasa relatif berimbang setiap daerah sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk dapat mengurangi belanja langsung. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian Sasana (2011) yang

menyatakan jumlah penduduk berhubungan positif dan berpengaruh terhadap belanja daerah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Statistik Indonesia periode 2011-2015. Dengan menggunakan metode purposive sampling, dari 34 provinsi, didapatkan 31 provinsi yang memenuhi kriteria dengan waktu penelitian selama 5 tahun. Sehingga total observasi yang diteliti berjumlah 155.

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang dipaparkan, maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel dana alokasi umum yang ditransformasikan menjadi Ln terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin tinggi pula belanja daerah pada suatu provinsi.
2. Variabel dana alokasi khusus yang ditransformasikan menjadi Ln terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima

dari pemerintah pusat maka semakin tinggi pula belanja daerah pada suatu provinsi.

3. Variabel dana bagi hasil yang ditransformasikan menjadi Ln terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin tinggi pula belanja daerah pada suatu provinsi.
4. Variabel pendapatan asli daerah yang ditransformasikan menjadi Ln terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan maka semakin tinggi pula belanja daerah pada suatu provinsi.
5. Variabel jumlah penduduk yang ditransformasikan menjadi Ln terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk pada suatu daerah maka belum tentu semakin banyak belanja daerah pada provinsi tersebut. Belanja daerah cenderung lebih tergantung kepada pendapatan yang ditransfer dari pemerintah pusat dan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri (Devita, Delis, dan Junaidi, 2014).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan jumlah

penduduk terhadap belanja daerah di seluruh provinsi di Indonesia periode 2011-2015 menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Dengan banyaknya transfer dari pemerintah pusat, maka suatu provinsi akan cenderung memiliki jumlah belanja yang tinggi juga. Dengan adanya pendapatan yang tinggi, pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan daerahnya agar antar komponen belanja daerah tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, peran dari pemerintah pusat sebagai pemberi tanggungjawab juga diperlukan. Pemerintah pusat diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah terkait penggunaan dana untuk belanja daerahnya.
2. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri menggunakan kekayaan daerahnya masing-masing. Apabila pemerintah daerah dapat menggali potensi daerahnya dengan baik, maka jumlah pendapatan yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Dengan adanya jumlah pendapatan yang tinggi, pemerintah daerah diharapkan dapat transparan dalam menggunakan dana dan

mengalokasikan pendapatan tersebut dengan sebaik-baiknya guna memajukan daerah atau provinsi tersebut secara maksimal.

3. Jumlah penduduk dalam suatu provinsi seharusnya dapat membantu pemerintah daerah agar daerahnya menjadi lebih maju. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas baik dengan adanya pemberian pinjaman modal kerja ataupun pelatihan-pelatihan yang dapat bermanfaat untuk daerahnya. Penduduk pun dapat membantu mengawasi dan juga membantu melalui saran mengenai apa saja yang dapat diperbaiki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel independen lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh kepada belanja daerah seperti PDRB atau lain-lain pendapatan yang sah.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lainnya yang terfokus pada satu provinsi mendapatkan hasil yang lebih jelas menggambarkan kondisi disuatu provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal SNA VI:1140-1159. Surabaya.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aprilla, Nila dan Redo Arian Saputra. 2013. *Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 3(2):107-132. Universitas Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Devita, Andri, Arman Delis, dan Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2(2): 63-70. Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C. dan Willian H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3:305-360. North-Holland Publishing Company.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purpitasari, Puput. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 4(11):1-16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 13(3):811-827. Universitas Udayana.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Salindeho, Claudia. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), 4(3):705-716. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sari, Rosy Puspita dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung*. E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3(10):452-459. Universitas Udayana.
- Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(1):46-58. Universitas Diponegoro Semarang.
- Segoro, Waseso dan Mega Pratiwi. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Jurnal Simposium Nasional. Universitas Gunadarma.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Analisis atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Humanity, 1(1):23-28. Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sumber Internet:

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3287809/pusat-tunda-cairkan-dau-kabupaten-ini-siapkan-strategi-pembiayaan>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3427641/daerah-otonom-paling-banyak-habiskan-apbd-buat-gaji-pns>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<http://finance.detik.com/moneter/3129195/ini-daftar-provinsi-dengan-dana-menganggur-terbesar-di-2015>Diakses pada tanggal 4 Maret 2017)

<http://manadopostonline.com/read/2017/03/06/Ada-Ratusan-Miliar-DAK-Belum-Terbayar/20856/3>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216120324-78-98572/serapan-apbd-di-bawah-90-jatah-dak-kuartal-iv-dibekukan/>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/16/of4si1361-kaltim-minta-pusat-lunasi-utang-dana-bagi-hasil>(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<https://ekbis.sindonews.com/read/1175852/33/kemenkeu-minta-pemda-perbaiki-kualitas-belanja-apbd-1485864997>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2017)

<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/05/090852745/pemerintah-perangi-kemiskinan-lewat-dana-transfer>(Diakses pada tanggal 8 Maret 2017)

<https://www.bps.go.id/subjek/view/id/12>(Diakses pada tanggal 8 Maret 2017)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Mada, Jakarta 13220
 Telpun (021) 472122/476025; Fax: (021) 476025
 Laman: www.fe.unj.ac.id

Bimbingan
 Fakultas
 Ekonomi

ISO 9001:2008 CERTIFIED
 CELEBRATING
 10th ANNIVERSARY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Hasya Navira Gemilang
 2. No.Registrasi : 8355152490
 3. Program Studi : SI Akuntansi
 4. Dosen Pembimbing I : Rida Prihatni, NIP. 19760425 200112 2002
 5. Dosen Pembimbing II : Tri Hesti U, NIP. 19760107 200112 2001
 6. Judul Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah penduduk terhadap Selisih Daerah di seluruh provinsi di Indonesia 2011-2015

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI	DP II
1	23 Februari 2017	Konsultasi Judul	Pilih yg dikuasa	<i>[Signature]</i>	
2	28 Februari 2017	Konsultasi Judul & Acc Judul	Acc Judul, lanjutkan	<i>[Signature]</i>	
3	7 Maret 2017	BAB I	Perjelas Fenomena Lanjutkan	<i>[Signature]</i>	
4	13 Maret 2017	Revisi Bab I	Kaitkan teor dgn variabel	<i>[Signature]</i>	
5	14 Maret 2017	Bab II dan III	ACC.	<i>[Signature]</i>	
6	15 Maret 2017	Revisi Bab II & III	Coba outlier & treatment data tdk normal	<i>[Signature]</i>	
7	5 Mei 2017	Konsultasi Data	Perbanyak penjelasan di pembahasan	<i>[Signature]</i>	
8	22 Mei 2017	Bab IV	Perbaiki Implikasi	<i>[Signature]</i>	
9	23 Mei 2017	Bab IV & V			
10					
11					
12					
13					
14					

SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI *[Signature]*

Catatan :
 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



*Building
Future
Leaders*



ISO 9001:2008 CERTIFIED
CONTRIBUTING TO
SUSTAINABILITY

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706385, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : *Hasya Novia G*
 2. No.Registrasi : *833132490*
 3. Program Studi : *SI Akuntansi*
 4. Dosen Pembimbing I : *Rida Pratiwi, NIP. 19760425 200112 2002*
 5. Dosen Pembimbing II : *Ti Hesti U, NIP. 19760103 200112 2001*

6. Judul Skripsi : *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sumbah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di seluruh provinsi di Indonesia, 2011-2015*

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DF I	DF II
1	24 Februari 2017	Konsultasi	Mula tema yang sama di GORAS, dan perimbangan antara 4 msj variabel main		
2					
3					
4	1 Maret 2017	Konsultasi	ACC. Lanjut Bab I s.d. III		
5	8 Maret 2017	Konsultasi Bab I - II	Perbaiki Bab I (Latar belakang, pembahasan)		
6	14 Maret 2017	Revisi Bab I - II	Perbaiki penyusunan hipotesis & methodology		
7	15 Maret 2017	Revisi Bab I - II	Perbaiki penyusunan msj variabel		
8	17 Maret 2017	Konsultasi Bab I	ACC		
9	4 Mei 2017	Konsultasi Data	Coba uji outlier		
10	10 Mei 2017	Bab IV	Perbaiki & tambah penjelasan		
11	22 Mei 2017	Bab IV 8 J	Penumeran tabel		
12	23 Mei 2017	Bab IV 8 J	Perbaiki implikasi		
13					
14					

Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI

Lampiran 2 Data Penelitian Sebelum Outlier

PROVINSI	BD	DAU	DAK	DBH	PAD	JP
ACEH	6.933.855.547.123,50	716.646.172.000,00	50.611.300.000,00	1.494.787.433.720,00	802.840.173.817,19	4.619.000
ACEH	7.800.881.067.683,00	911.080.707.000,00	50.413.710.000,00	1.398.289.909.817,00	901.720.376.620,63	4.715.100
ACEH	10.149.028.020.869,30	1.092.445.518.000,00	75.148.510.000,00	1.507.854.184.109,00	1.325.435.091.289,19	4.811.100
ACEH	8.339.884.597.868,25	1.201.612.787.000,00	72.953.790.000,00	1.277.116.733.691,00	1.731.130.839.637,14	4.906.800
ACEH	8.288.808.024.008,05	1.237.894.986.000,00	70.866.056.000,00	253.017.430.543,00	1.972.049.032.901,98	4.993.385
SUMUT	3.810.442.642.638,60	948.867.504.000,00	38.485.500.000,00	386.544.541.087,00	3.578.462.081.779,94	13.220.900
SUMUT	7.082.763.526.441,00	1.103.389.237.000,00	41.628.390.000,00	460.163.932.563,00	4.050.753.903.338,00	13.408.200
SUMUT	6.738.346.879.653,90	1.223.445.404.000,00	54.823.448.000,00	432.333.703.611,00	4.091.285.888.816,07	13.590.300
SUMUT	6.115.747.670.917,20	1.349.132.276.000,00	59.728.388.000,00	403.778.317.079,00	4.416.811.865.266,62	13.766.900
SUMUT	5.628.338.813.603,60	1.139.261.371.000,00	47.746.880.500,00	334.244.916.798,00	4.883.880.619.308,22	13.923.262
SUMBAR	1.665.195.339.883,00	764.680.895.000,00	40.733.300.000,00	126.468.426.632,00	1.224.414.657.998,08	4.933.100
SUMBAR	2.558.224.338.240,59	918.560.365.000,00	32.500.720.000,00	192.834.767.485,00	1.225.490.641.909,33	5.000.200
SUMBAR	2.610.660.896.250,92	1.039.922.511.000,00	63.941.974.800,00	137.015.381.558,00	1.366.178.102.012,90	5.066.500
SUMBAR	2.842.088.440.186,95	1.129.886.306.000,00	54.108.200.000,00	149.064.512.233,00	1.729.222.284.039,71	5.131.900
SUMBAR	3.230.402.715.616,22	1.221.128.606.000,00	62.731.100.000,00	107.016.709.377,00	1.876.733.122.796,38	5.190.577
RIAU	3.754.114.131.401,63	380.051.123.500,00	56.823.400.000,00	2.789.961.856.924,00	2.210.130.782.733,83	5.726.200
RIAU	5.695.769.976.836,48	489.179.914.000,00	62.491.370.000,00	3.067.171.446.571,00	2.588.688.445.077,20	5.879.100
RIAU	6.387.475.632.939,30	726.630.916.000,00	38.738.320.000,00	2.844.812.993.607,00	2.725.623.913.109,06	6.033.300
RIAU	3.872.730.800.658,64	820.984.584.000,00	43.737.510.000,00	3.367.086.539.743,00	3.245.087.745.089,53	6.188.400
RIAU	5.544.603.975.223,72	654.220.250.000,00	63.362.192.000,00	1.831.045.031.189,00	3.476.960.097.649,19	6.330.941
JAMBI	1.458.895.869.010,50	583.882.413.000,00	24.735.600.000,00	466.589.706.996,00	984.232.579.912,83	3.167.600
JAMBI	2.259.162.243.597,75	731.952.242.000,00	33.109.538.000,00	576.140.512.809,23	995.202.289.115,94	3.227.100

JAMBI	2.546.459.947.959,24	836.578.062.000,00	51.035.790.000,00	599.945.311.316,00	1.063.879.903.502,10	3.286.100
JAMBI	2.603.725.407.149,90	948.337.712.000,00	49.355.510.000,00	516.825.167.008,00	1.281.239.472.808,44	3.344.400
JAMBI	2.838.721.753.215,74	1.009.165.864.000,00	57.944.770.000,00	351.969.164.364,00	1.241.223.028.011,76	3.397.164
SUMSEL	3.432.684.817.083,00	646.813.301.000,00	32.287.000.000,00	1.313.456.699.412,00	1.849.119.912.016,18	7.598.500
SUMSEL	4.560.653.743.214,26	716.153.261.000,00	45.401.430.000,00	1.617.243.959.801,00	2.001.714.583.551,61	7.714.300
SUMSEL	5.563.475.998.931,20	870.516.767.000,00	25.188.400.000,00	1.753.511.287.338,00	2.021.696.787.275,10	7.828.700
SUMSEL	5.513.061.354.274,57	985.542.760.000,00	62.754.900.000,00	1.934.568.340.798,00	2.422.673.788.768,86	7.941.500
SUMSEL	4.497.889.160.889,22	931.915.470.000,00	69.405.320.000,00	1.328.407.541.330,00	2.534.526.413.315,20	8.043.042
BENGGKULU	908.399.387.237,00	607.388.036.000,00	36.609.600.000,00	68.266.688.698,00	440.920.183.714,43	1.753.000
BENGGKULU	1.378.336.235.655,00	775.311.166.000,00	28.620.610.000,00	79.064.896.752,00	483.768.274.997,19	1.783.700
BENGGKULU	1.584.855.547.996,40	854.647.828.000,00	51.587.333.000,00	71.112.795.983,00	525.207.934.928,81	1.814.400
BENGGKULU	1.723.665.668.563,00	955.095.187.000,00	53.927.020.000,00	95.560.468.517,00	672.064.468.248,82	1.844.800
BENGGKULU	2.070.416.553.571,20	1.046.080.820.000,00	63.893.200.000,00	99.011.345.208,00	701.300.383.228,96	1.872.136
LAMPUNG	2.159.104.269.385,00	769.973.038.000,00	42.210.200.000,00	251.104.017.376,00	1.376.418.352.350,29	7.735.900
LAMPUNG	3.363.892.812.536,15	939.139.287.000,00	31.087.640.000,00	310.624.594.963,00	1.666.717.331.753,00	7.835.300
LAMPUNG	3.527.063.690.921,85	1.060.663.183.000,00	60.108.230.000,00	263.272.124.032,00	1.771.297.934.878,73	7.932.100
LAMPUNG	3.731.091.504.819,15	1.136.053.041.000,00	48.851.620.000,00	287.581.907.518,00	2.274.685.572.912,86	8.026.200
LAMPUNG	3.996.405.467.936,86	1.097.129.439.000,00	245.066.400.000,00	172.095.689.636,00	2.247.342.667.611,39	8.109.601
KEPBABEL	959.499.865.946,99	481.589.915.000,00	17.880.900.000,00	201.039.549.139,00	459.208.310.011,69	1.258.200
KEPBABEL	982.147.844.237,87	634.087.815.000,00	25.135.650.000,00	162.276.531.517,00	438.373.572.678,64	1.286.600
KEPBABEL	1.271.021.135.027,03	717.140.118.000,00	44.170.570.000,00	146.525.227.596,00	495.786.504.873,15	1.315.100
KEPBABEL	1.182.430.679.931,78	806.820.146.000,00	43.372.460.000,00	174.950.191.595,00	563.108.840.861,42	1.343.900
KEPBABEL	1.360.034.750.933,51	897.887.443.000,00	44.355.816.000,00	188.157.236.449,00	571.802.890.055,14	1.370.331
KEPRIAU	1.692.024.309.729,88	395.745.542.000,00	21.903.200.000,00	829.255.427.699,00	620.901.423.130,64	1.748.800
KEPRIAU	1.993.600.304.560,33	460.857.807.000,00	23.165.600.000,00	1.110.423.502.004,00	723.053.960.334,89	1.805.100

KEPRIAU	2.432.337.053.488,36	656.067.610.000,00	36.672.910.000,00	1.060.969.973.429,00	907.982.180.251,02	1.861.400
KEPRIAU	3.059.564.530.502,84	698.009.318.000,00	41.678.090.000,00	925.272.475.176,00	1.070.208.288.698,16	1.917.400
KEPRIAU	4.423.031.539.268,94	695.943.711.000,00	42.537.210.000,00	507.640.852.175,00	1.013.226.321.363,58	1.986.313
JABAR	7.576.777.864.856,00	1.181.553.108.000,00	45.764.600.000,00	1.298.760.318.559,00	8.502.566.839.986,35	43.938.800
JABAR	13.761.252.661.652,00	1.269.960.760.000,00	48.356.280.000,00	1.514.429.568.832,00	9.982.917.414.759,00	44.643.500
JABAR	14.402.468.091.806,00	1.472.453.011.000,00	80.072.050.000,00	1.398.007.484.672,00	12.360.109.870.372,00	45.340.800
JABAR	15.336.449.436.973,00	1.687.686.386.000,00	78.215.030.000,00	1.494.604.220.017,00	15.038.153.309.919,00	46.029.600
JABAR	13.681.457.430.252,00	1.303.654.355.000,00	18.904.024.000,00	1.184.319.132.840,00	16.032.856.414.345,00	46.668.214
JATENG	4.149.439.179.371,00	1.276.180.223.000,00	51.789.800.000,00	622.219.342.492,00	5.564.233.151.730,00	32.725.400
JATENG	7.285.316.608.242,00	1.516.892.951.000,00	50.630.450.000,00	751.282.698.223,00	6.629.308.010.656,00	32.998.700
JATENG	8.396.011.662.917,00	1.670.859.369.000,00	82.522.510.000,00	714.432.749.973,00	8.212.800.640.888,00	33.264.300
JATENG	9.161.150.561.924,00	1.803.931.189.000,00	79.165.240.000,00	659.530.315.680,00	9.916.358.231.432,00	33.522.700
JATENG	11.387.301.681.483,00	1.629.429.283.000,00	57.972.640.000,00	569.741.071.740,00	10.904.825.812.504,00	33.753.023
DIY	1.294.221.394.645,00	620.812.328.000,00	19.489.600.000,00	82.037.725.053,00	867.112.885.352,87	3.510.000
DIY	1.739.517.404.467,00	757.056.696.000,00	19.052.740.000,00	118.434.888.851,00	1.004.063.125.812,33	3.552.500
DIY	2.009.915.603.997,57	828.334.768.000,00	34.495.900.000,00	94.731.182.914,00	1.216.102.749.617,01	3.594.900
DIY	2.387.197.918.533,94	899.923.550.000,00	37.131.610.000,00	76.756.229.590,00	1.464.604.954.200,16	3.637.100
DIY	2.795.636.515.967,65	920.544.722.000,00	39.084.040.000,00	62.257.506.197,00	1.593.110.769.595,00	3.675.768
JATIM	7.774.106.639.974,19	1.347.501.699.000,00	55.031.200.000,00	1.125.553.550.989,00	8.898.616.683.296,90	37.840.700
JATIM	10.982.256.889.086,30	1.491.561.136.000,00	53.490.060.000,00	1.523.964.905.831,00	9.584.081.971.227,10	38.106.600
JATIM	12.670.706.302.297,80	1.623.648.287.000,00	85.644.430.000,00	1.374.591.582.095,00	11.579.340.719.022,00	38.363.200
JATIM	12.708.929.897.078,90	1.866.548.185.000,00	101.875.970.000,00	1.516.912.612.166,00	14.442.216.534.958,90	38.610.200
JATIM	15.129.348.547.368,70	1.587.261.707.000,00	66.039.190.000,00	1.462.318.221.152,00	15.402.647.674.502,50	38.828.061
BANTEN	2.885.149.177.616,00	460.383.683.000,00	45.179.600.000,00	343.927.421.021,00	2.895.569.551.292,00	10.943.800
BANTEN	4.140.076.262.914,00	530.833.378.000,00	29.687.200.000,00	454.584.589.897,00	3.395.883.043.919,00	11.198.600

BANTEN	3.960.865.642.094,00	617.081.101.000,00	10.601.213.000,00	498.321.857.838,00	4.118.551.716.459,00	11.452.500
BANTEN	6.192.155.567.940,00	728.490.012.000,00	12.538.478.000,00	418.844.143.122,00	4.899.123.741.756,00	11.704.900
BANTEN	5.505.735.078.498,00	640.981.003.000,00	16.789.048.000,00	319.017.534.900,00	4.972.737.619.281,00	11.934.373
BALI	1.897.376.313.003,42	560.673.539.000,00	15.916.275.000,00	128.698.319.040,00	1.723.807.095.831,05	3.957.600
BALI	2.728.951.897.110,40	694.079.080.000,00	34.025.910.000,00	180.266.157.269,00	2.042.091.095.774,66	4.007.200
BALI	3.197.308.351.398,22	792.365.876.000,00	43.835.380.000,00	144.513.543.525,00	2.529.976.146.703,70	4.056.300
BALI	4.011.394.613.668,32	832.297.473.000,00	41.600.750.000,00	144.532.785.887,00	2.920.416.697.074,56	4.104.900
BALI	3.220.486.920.376,26	831.597.268.000,00	134.496.571.000,00	104.103.308.350,00	2.910.661.548.976,61	4.148.588
NTB	1.473.934.430.586,27	646.671.083.000,00	45.964.400.000,00	162.674.615.727,00	741.291.174.995,39	4.581.800
NTB	1.993.680.075.392,53	809.617.715.000,00	53.326.340.000,00	191.526.128.114,00	745.979.866.410,64	4.646.800
NTB	2.159.468.418.448,14	859.353.026.000,00	57.407.690.000,00	158.244.269.595,00	858.154.094.987,46	4.710.800
NTB	2.159.296.778.711,33	980.390.340.000,00	54.663.430.000,00	177.032.677.141,00	1.115.060.397.173,45	4.773.800
NTB	2.916.700.347.575,78	1.088.633.717.000,00	214.257.150.000,00	147.804.397.778,00	1.372.661.567.125,00	4.830.118
NTT	1.143.832.766.173,00	752.057.444.000,00	47.399.400.000,00	87.834.594.936,00	391.828.733.404,00	4.788.600
NTT	2.027.715.118.403,00	940.646.764.000,00	57.088.950.000,00	101.259.360.750,00	458.793.895.486,00	4.871.200
NTT	2.234.008.404.402,00	1.003.991.703.000,00	77.822.660.000,00	84.034.259.793,00	523.201.203.067,00	4.954.000
NTT	2.421.833.119.667,00	1.131.667.590.000,00	74.235.910.000,00	76.821.847.275,00	763.300.806.702,00	5.036.900
NTT	2.983.355.501.405,00	1.300.445.875.000,00	100.654.710.000,00	60.821.837.707,00	882.315.240.378,00	5.112.760
KALBAR	1.704.722.621.089,25	845.483.888.000,00	38.369.500.000,00	154.006.771.302,00	1.080.421.507.604,31	4.488.900
KALBAR	2.596.615.435.199,25	1.023.229.807.000,00	43.913.040.000,00	182.691.159.483,00	1.164.425.411.547,34	4.565.600
KALBAR	2.840.660.259.231,72	1.144.712.840.000,00	74.172.390.000,00	163.157.232.642,00	1.347.396.423.743,14	4.641.600
KALBAR	3.216.973.537.840,85	1.290.222.856.000,00	63.189.480.000,00	178.456.566.983,00	1.621.610.890.848,66	4.716.100
KALBAR	2.957.561.431.058,21	1.405.594.169.000,00	85.584.200.000,00	153.476.958.863,00	1.702.542.350.065,28	4.783.209
KALTENG	1.232.853.880.707,28	795.816.335.000,00	51.915.000.000,00	235.356.781.046,00	815.244.765.132,56	2.275.100
KALTENG	1.978.823.943.039,60	951.256.068.000,00	50.184.280.000,00	293.906.722.800,00	963.662.159.745,78	2.329.800

KALTENG	2.442.752.181.555,47	1.062.516.940.000,00	63.299.310.000,00	316.661.423.796,00	1.093.821.486.342,18	2.384.700
KALTENG	2.708.401.254.079,75	1.152.428.738.000,00	61.929.830.000,00	343.057.931.094,00	1.253.708.122.296,09	2.439.900
KALTENG	2.943.921.541.005,60	1.280.595.848.000,00	72.525.960.000,00	320.254.878.956,00	1.174.969.266.556,62	2.490.178
KALSEL	1.920.926.676.401,17	504.876.152.000,00	37.246.400.000,00	653.442.462.393,00	1.868.594.744.036,27	3.714.300
KALSEL	2.639.283.785.253,94	652.535.312.000,00	38.848.250.000,00	843.080.216.392,00	2.476.159.926.154,70	3.785.000
KALSEL	3.626.018.880.913,98	683.511.441.000,00	41.553.540.000,00	780.058.338.103,00	2.502.279.216.337,25	3.854.500
KALSEL	3.685.223.275.692,94	701.725.536.000,00	54.189.940.000,00	767.799.139.711,00	2.898.704.954.479,94	3.922.800
KALSEL	3.978.267.063.762,48	571.244.689.000,00	63.890.470.000,00	939.985.570.450,00	2.584.908.313.890,91	3.984.315
SULUT	1.098.324.927.911,00	619.711.007.000,00	29.288.200.000,00	80.361.935.173,00	535.087.974.492,00	2.305.900
SULUT	1.572.961.922.508,00	790.534.491.000,00	43.539.930.000,00	99.292.276.430,00	633.650.532.712,00	2.333.500
SULUT	1.769.413.775.799,00	885.684.277.000,00	54.346.140.000,00	89.815.076.904,00	790.273.619.619,00	2.360.400
SULUT	1.935.649.830.151,00	949.852.622.000,00	59.675.060.000,00	84.421.635.889,00	937.681.926.708,00	2.386.600
SULUT	2.265.349.528.201,00	1.026.948.809.000,00	76.744.790.000,00	69.347.787.645,00	1.012.945.961.386,00	2.409.921
SULTENG	1.246.882.296.673,25	743.161.759.000,00	38.179.100.000,00	82.887.818.405,00	519.844.404.991,21	2.692.800
SULTENG	1.791.572.130.097,02	790.534.491.000,00	43.237.070.000,00	97.601.766.326,00	605.821.437.425,82	2.739.300
SULTENG	1.950.726.964.800,50	994.658.685.000,00	65.949.350.000,00	100.189.491.883,00	662.226.615.049,50	2.785.500
SULTENG	2.445.661.248.020,50	1.087.885.014.000,00	63.942.480.000,00	87.949.453.097,00	824.611.352.385,31	2.831.300
SULTENG	2.645.745.703.931,07	1.221.602.865.000,00	250.986.290.000,00	85.165.410.164,00	904.937.124.509,16	2.872.857
SULSEL	2.083.425.143.735,05	816.757.969.000,00	41.886.000.000,00	248.345.220.303,00	1.959.515.902.109,82	8.156.100
SULSEL	3.927.067.917.825,34	902.087.729.000,00	42.774.470.000,00	309.478.526.666,00	2.198.776.396.284,65	8.250.000
SULSEL	4.081.099.922.430,16	1.089.771.438.000,00	64.264.340.000,00	268.130.040.457,00	2.560.045.632.511,80	8.342.000
SULSEL	4.499.032.192.457,29	1.209.598.741.000,00	72.976.480.000,00	248.811.019.824,00	3.029.122.238.495,78	8.432.200
SULSEL	4.514.809.893.426,89	1.180.010.167.000,00	222.686.392.000,00	188.057.830.411,00	3.270.828.511.466,51	8.512.608
SULTRA	1.004.037.893.490,76	700.836.557.000,00	33.804.600.000,00	82.744.077.124,00	346.169.830.959,16	2.294.400
SULTRA	1.610.635.836.383,46	996.939.584.000,00	34.659.800.000,00	115.207.475.481,00	439.184.485.917,41	2.345.500

SULTRA	1.598.130.177.442,82	981.035.741.000,00	53.266.770.000,00	126.593.343.568,00	514.857.031.059,96	2.396.700
SULTRA	1.885.381.745.505,78	1.053.636.011.000,00	58.750.010.000,00	123.630.558.241,00	599.942.751.257,23	2.448.100
SULTRA	2.045.586.878.945,00	1.176.423.577.000,00	86.399.950.000,00	121.027.372.555,00	667.079.209.826,08	2.495.248
GRNTL	668.200.748.748,00	461.118.102.000,00	28.057.200.000,00	26.813.585.384,00	157.472.326.552,91	1.062.600
GRNTL	829.838.428.133,00	869.882.871.000,00	24.008.330.000,00	30.858.457.335,00	180.039.376.122,83	1.080.300
GRNTL	972.578.382.602,00	652.284.261.000,00	43.013.530.000,00	26.800.697.898,00	214.614.527.481,13	1.098.000
GRNTL	1.091.851.536.360,55	734.279.438.000,00	42.374.060.000,00	23.660.330.654,00	281.920.210.038,54	1.115.600
GRNTL	1.266.971.897.927,00	845.395.651.000,00	87.883.960.000,00	20.766.583.149,00	289.557.151.741,95	1.131.670
SULBAR	693.251.740.696,00	441.578.798.000,00	35.860.700.000,00	35.302.600.280,00	114.310.884.837,04	1.187.500
SULBAR	817.093.086.943,00	590.680.361.000,00	36.786.280.000,00	43.679.976.683,00	140.396.939.510,00	1.210.700
SULBAR	964.108.706.424,00	685.497.592.000,00	47.017.000.000,00	39.591.545.666,00	154.131.860.472,00	1.234.300
SULBAR	1.157.422.383.585,82	776.214.122.000,00	50.585.710.000,00	30.299.102.754,00	223.704.907.218,29	1.258.100
SULBAR	1.385.841.990.547,96	895.580.933.000,00	72.513.950.000,00	23.535.722.275,00	273.507.239.232,00	1.279.994
MALUKU	1.050.078.384.226,20	703.993.953.000,00	44.657.700.000,00	79.621.224.533,00	221.882.123.096,08	1.570.700
MALUKU	1.276.193.041.795,14	829.491.474.000,00	38.062.680.000,00	91.350.628.092,00	266.227.289.574,54	1.599.500
MALUKU	1.485.053.522.135,51	897.657.192.000,00	53.424.880.000,00	75.747.288.758,00	304.364.504.300,28	1.628.400
MALUKU	1.726.133.264.289,81	1.019.704.312.000,00	70.134.160.000,00	75.633.451.932,00	425.425.607.781,12	1.657.400
MALUKU	2.096.259.256.383,20	1.177.774.674.000,00	216.914.600.000,00	58.460.626.103,00	390.813.371.781,13	1.683.856
MALUT	684.991.121.948,00	540.389.811.000,00	51.233.800.000,00	99.383.715.937,00	84.773.698.195,70	1.067.200
MALUT	1.215.801.421.932,00	703.159.025.000,00	37.858.020.000,00	117.013.965.138,00	115.905.322.981,68	1.091.100
MALUT	1.387.593.135.306,00	772.591.162.000,00	69.688.380.000,00	98.387.626.467,00	165.886.906.927,52	1.114.900
MALUT	1.398.293.236.323,42	906.623.550.000,00	74.623.090.000,00	108.427.698.801,00	203.059.697.909,92	1.138.700
MALUT	1.667.548.584.180,00	1.061.177.950.000,00	146.686.448.000,00	95.965.198.014,00	236.054.304.107,32	1.160.275
PAPUA	6.186.706.650.384,75	1.276.285.908.000,00	72.115.650.000,00	545.083.289.030,00	363.100.749.953,73	2.915.300
PAPUA	7.125.265.905.120,00	1.569.782.444.000,00	106.191.170.000,00	442.476.496.170,00	623.162.647.355,00	2.973.800

PAPUA	7.938.551.683.742,00	1.889.267.850.000,00	133.897.240.000,00	487.855.595.954,00	633.726.316.291,00	3.032.500
PAPUA	10.023.005.710.304,00	1.991.202.341.100,00	120.505.640.000,00	532.105.015.586,00	944.929.691.841,00	3.091.000
PAPUA	7.275.918.304.885,00	2.277.932.698.000,00	460.303.520.000,00	517.999.391.860,00	912.908.312.259,00	3.143.088
PABAR	3.157.087.036.882,00	700.444.910.000,00	40.538.900.000,00	742.881.620.930,00	152.163.908.940,53	786.000
PABAR	3.450.877.647.112,00	901.398.453.000,00	38.633.110.000,00	576.125.138.593,00	175.450.133.075,69	807.000
PABAR	3.736.984.779.344,10	1.064.872.637.000,00	64.931.200.000,00	1.862.951.513.294,00	236.282.889.480,20	828.300
PABAR	3.229.645.614.556,00	1.122.264.659.000,00	61.215.730.000,00	1.600.164.845.923,00	306.674.697.583,22	849.800
PABAR	4.143.993.546.875,99	1.284.079.495.000,00	92.376.080.000,00	1.119.808.321.072,00	322.799.297.751,61	868.819

Lampiran 3 Data Penelitian (Log Normalitas) Sebelum Outlier

PROVINSI	LnBD	LnDAU	LnDAK	LnDBH	LnPAD	LnJP
ACEH	29,57	27,3	24,65	28,03	27,41	15,35
ACEH	29,69	27,54	24,64	27,97	27,53	15,37
ACEH	29,95	27,72	25,04	28,04	27,91	15,39
ACEH	29,75	27,81	25,01	27,88	28,18	15,41
ACEH	29,75	27,84	24,98	26,26	28,31	15,42
SUMUT	28,97	27,58	24,37	26,68	28,91	16,4
SUMUT	29,59	27,73	24,45	26,85	29,03	16,41
SUMUT	29,54	27,83	24,73	26,79	29,04	16,42
SUMUT	29,44	27,93	24,81	26,72	29,12	16,44
SUMUT	29,36	27,76	24,59	26,54	29,22	16,45
SUMBAR	28,14	27,36	24,43	25,56	27,83	15,41
SUMBAR	28,57	27,55	24,2	25,99	27,83	15,42
SUMBAR	28,59	27,67	24,88	25,64	27,94	15,44
SUMBAR	28,68	27,75	24,71	25,73	28,18	15,45
SUMBAR	28,8	27,83	24,86	25,4	28,26	15,46
RIAU	28,95	26,66	24,76	28,66	28,42	15,56
RIAU	29,37	26,92	24,86	28,75	28,58	15,59
RIAU	29,49	27,31	24,38	28,68	28,63	15,61
RIAU	28,98	27,43	24,5	28,85	28,81	15,64
RIAU	29,34	27,21	24,87	28,24	28,88	15,66
JAMBI	28,01	27,09	23,93	26,87	27,62	14,97
JAMBI	28,45	27,32	24,22	27,08	27,63	14,99
JAMBI	28,57	27,45	24,66	27,12	27,69	15,01
JAMBI	28,59	27,58	24,62	26,97	27,88	15,02
JAMBI	28,67	27,64	24,78	26,59	27,85	15,04
SUMSEL	28,86	27,2	24,2	27,9	28,25	15,84
SUMSEL	29,15	27,3	24,54	28,11	28,33	15,86
SUMSEL	29,35	27,49	23,95	28,19	28,33	15,87
SUMSEL	29,34	27,62	24,86	28,29	28,52	15,89
SUMSEL	29,13	27,56	24,96	27,92	28,56	15,9
BENGGKULU	27,53	27,13	24,32	24,95	26,81	14,38
BENGGKULU	27,95	27,38	24,08	25,09	26,9	14,39
BENGGKULU	28,09	27,47	24,67	24,99	26,99	14,41
BENGGKULU	28,18	27,59	24,71	25,28	27,23	14,43
BENGGKULU	28,36	27,68	24,88	25,32	27,28	14,44
LAMPUNG	28,4	27,37	24,47	26,25	27,95	15,86
LAMPUNG	28,84	27,57	24,16	26,46	28,14	15,87
LAMPUNG	28,89	27,69	24,82	26,3	28,2	15,89

LAMPUNG	28,95	27,76	24,61	26,38	28,45	15,9
LAMPUNG	29,02	27,72	26,22	25,87	28,44	15,91
KEPBABEL	27,59	26,9	23,61	26,03	26,85	14,05
KEPBABEL	27,61	27,18	23,95	25,81	26,81	14,07
KEPBABEL	27,87	27,3	24,51	25,71	26,93	14,09
KEPBABEL	27,8	27,42	24,49	25,89	27,06	14,11
KEPBABEL	27,94	27,52	24,52	25,96	27,07	14,13
KEPRIAU	28,16	26,7	23,81	27,44	27,15	14,37
KEPRIAU	28,32	26,86	23,87	27,74	27,31	14,41
KEPRIAU	28,52	27,21	24,33	27,69	27,53	14,44
KEPRIAU	28,75	27,27	24,45	27,55	27,7	14,47
KEPRIAU	29,12	27,27	24,47	26,95	27,64	14,5
JABAR	29,66	27,8	24,55	27,89	29,77	17,6
JABAR	30,25	27,87	24,6	28,05	29,93	17,61
JABAR	30,3	28,02	25,11	27,97	30,15	17,63
JABAR	30,36	28,15	25,08	28,03	30,34	17,64
JABAR	30,25	27,9	23,66	27,8	30,41	17,66
JATENG	29,05	27,87	24,67	27,16	29,35	17,3
JATENG	29,62	28,05	24,65	27,35	29,52	17,31
JATENG	29,76	28,14	25,14	27,29	29,74	17,32
JATENG	29,85	28,22	25,09	27,21	29,93	17,33
JATENG	30,06	28,12	24,78	27,07	30,02	17,33
DIY	27,89	27,15	23,69	25,13	27,49	15,07
DIY	28,18	27,35	23,67	25,5	27,64	15,08
DIY	28,33	27,44	24,26	25,27	27,83	15,1
DIY	28,5	27,53	24,34	25,06	28,01	15,11
DIY	28,66	27,55	24,39	24,85	28,1	15,12
JATIM	29,68	27,93	24,73	27,75	29,82	17,45
JATIM	30,03	28,03	24,7	28,05	29,89	17,46
JATIM	30,17	28,12	25,17	27,95	30,08	17,46
JATIM	30,17	28,26	25,35	28,05	30,3	17,47
JATIM	30,35	28,09	24,91	28,01	30,37	17,47
BANTEN	28,69	26,86	24,53	26,56	28,69	16,21
BANTEN	29,05	27	24,11	26,84	28,85	16,23
BANTEN	29,01	27,15	23,08	26,93	29,05	16,25
BANTEN	29,45	27,31	23,25	26,76	29,22	16,28
BANTEN	29,34	27,19	23,54	26,49	29,23	16,29
BALI	28,27	27,05	23,49	25,58	28,18	15,19
BALI	28,63	27,27	24,25	25,92	28,34	15,2
BALI	28,79	27,4	24,5	25,7	28,56	15,22
BALI	29,02	27,45	24,45	25,7	28,7	15,23

BALI	28,8	27,45	25,62	25,37	28,7	15,24
NTB	28,02	27,2	24,55	25,82	27,33	15,34
NTB	28,32	27,42	24,7	25,98	27,34	15,35
NTB	28,4	27,48	24,77	25,79	27,48	15,37
NTB	28,4	27,61	24,72	25,9	27,74	15,38
NTB	28,7	27,72	26,09	25,72	27,95	15,39
NTT	27,77	27,35	24,58	25,2	26,69	15,38
NTT	28,34	27,57	24,77	25,34	26,85	15,4
NTT	28,43	27,64	25,08	25,15	26,98	15,42
NTT	28,52	27,75	25,03	25,06	27,36	15,43
NTT	28,72	27,89	25,33	24,83	27,51	15,45
KALBAR	28,16	27,46	24,37	25,76	27,71	15,32
KALBAR	28,59	27,65	24,51	25,93	27,78	15,33
KALBAR	28,68	27,77	25,03	25,82	27,93	15,35
KALBAR	28,8	27,89	24,87	25,91	28,11	15,37
KALBAR	28,72	27,97	25,17	25,76	28,16	15,38
KALTENG	27,84	27,4	24,67	26,18	27,43	14,64
KALTENG	28,31	27,58	24,64	26,41	27,59	14,66
KALTENG	28,52	27,69	24,87	26,48	27,72	14,68
KALTENG	28,63	27,77	24,85	26,56	27,86	14,71
KALTENG	28,71	27,88	25,01	26,49	27,79	14,73
KALSEL	28,28	26,95	24,34	27,21	28,26	15,13
KALSEL	28,6	27,2	24,38	27,46	28,54	15,15
KALSEL	28,92	27,25	24,45	27,38	28,55	15,16
KALSEL	28,94	27,28	24,72	27,37	28,7	15,18
KALSEL	29,01	27,07	24,88	27,57	28,58	15,2
SULUT	27,72	27,15	24,1	25,11	27,01	14,65
SULUT	28,08	27,4	24,5	25,32	27,17	14,66
SULUT	28,2	27,51	24,72	25,22	27,4	14,67
SULUT	28,29	27,58	24,81	25,16	27,57	14,69
SULUT	28,45	27,66	25,06	24,96	27,64	14,7
SULTENG	27,85	27,33	24,37	25,14	26,98	14,81
SULTENG	28,21	27,4	24,49	25,3	27,13	14,82
SULTENG	28,3	27,63	24,91	25,33	27,22	14,84
SULTENG	28,53	27,72	24,88	25,2	27,44	14,86
SULTENG	28,6	27,83	26,25	25,17	27,53	14,87
SULSEL	28,37	27,43	24,46	26,24	28,3	15,91
SULSEL	29	27,53	24,48	26,46	28,42	15,93
SULSEL	29,04	27,72	24,89	26,31	28,57	15,94
SULSEL	29,13	27,82	25,01	26,24	28,74	15,95
SULSEL	29,14	27,8	26,13	25,96	28,82	15,96

SULTRA	27,64	27,28	24,24	25,14	26,57	14,65
SULTRA	28,11	27,63	24,27	25,47	26,81	14,67
SULTRA	28,1	27,61	24,7	25,56	26,97	14,69
SULTRA	28,27	27,68	24,8	25,54	27,12	14,71
SULTRA	28,35	27,79	25,18	25,52	27,23	14,73
GRNTL	27,23	26,86	24,06	24,01	25,78	13,88
GRNTL	27,44	27,49	23,9	24,15	25,92	13,89
GRNTL	27,6	27,2	24,48	24,01	26,09	13,91
GRNTL	27,72	27,32	24,47	23,89	26,36	13,92
GRNTL	27,87	27,46	25,2	23,76	26,39	13,94
SULBAR	27,26	26,81	24,3	24,29	25,46	13,99
SULBAR	27,43	27,1	24,33	24,5	25,67	14,01
SULBAR	27,59	27,25	24,57	24,4	25,76	14,03
SULBAR	27,78	27,38	24,65	24,13	26,13	14,05
SULBAR	27,96	27,52	25,01	23,88	26,33	14,06
MALUKU	27,68	27,28	24,52	25,1	26,13	14,27
MALUKU	27,87	27,44	24,36	25,24	26,31	14,29
MALUKU	28,03	27,52	24,7	25,05	26,44	14,3
MALUKU	28,18	27,65	24,97	25,05	26,78	14,32
MALUKU	28,37	27,79	26,1	24,79	26,69	14,34
MALUT	27,25	27,02	24,66	25,32	25,16	13,88
MALUT	27,83	27,28	24,36	25,49	25,48	13,9
MALUT	27,96	27,37	24,97	25,31	25,83	13,92
MALUT	27,97	27,53	25,04	25,41	26,04	13,95
MALUT	28,14	27,69	25,71	25,29	26,19	13,96
PAPUA	29,45	27,87	25	27,02	26,62	14,89
PAPUA	29,59	28,08	25,39	26,82	27,16	14,91
PAPUA	29,7	28,27	25,62	26,91	27,17	14,92
PAPUA	29,94	28,32	25,51	27	27,57	14,94
PAPUA	29,62	28,45	26,86	26,97	27,54	14,96
PABAR	28,78	27,27	24,43	27,33	25,75	13,57
PABAR	28,87	27,53	24,38	27,08	25,89	13,6
PABAR	28,95	27,69	24,9	28,25	26,19	13,63
PABAR	28,8	27,75	24,84	28,1	26,45	13,65
PABAR	29,05	27,88	25,25	27,74	26,5	13,67

Lampiran 4 Statistik Deskriptif

- Sebelum Outlier

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln Belanja Daerah	155	27,23	30,36	28,6859	,73247
Ln DAU	155	26,66	28,45	27,5335	,33938
Ln DAK	155	23,49	26,86	24,6710	,54577
Ln DBH	155	23,76	28,85	26,2903	1,20384
Ln PAD	155	25,16	30,41	27,7785	1,15091
Ln JP	155	13,57	17,66	15,2373	1,00932
Valid N (listwise)	155				

- Sesudah Outlier

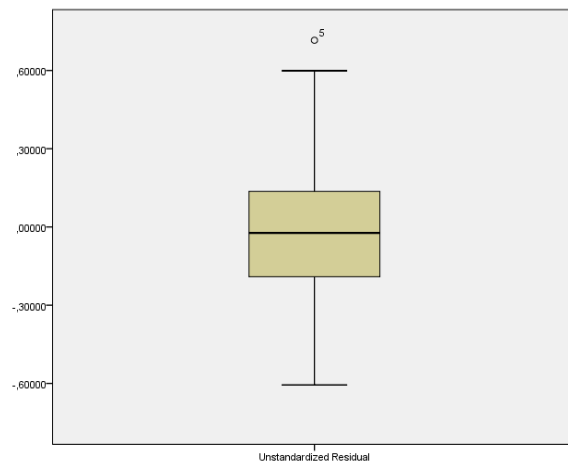
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln Belanja Daerah	145	27,23	30,36	28,6350	,72344
Ln DAU	145	26,66	28,45	27,5447	,33737
Ln DAK	145	23,49	26,86	24,6975	,52232
Ln DBH	145	23,76	28,85	26,2292	1,20807
Ln PAD	145	25,16	30,41	27,7330	1,16435
Ln JP	145	13,57	17,66	15,1972	1,02529
Valid N (listwise)	145				

Lampiran 5 Tahapan Outlier

1. Peneliti melakukan uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,25008915
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,052
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,050 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

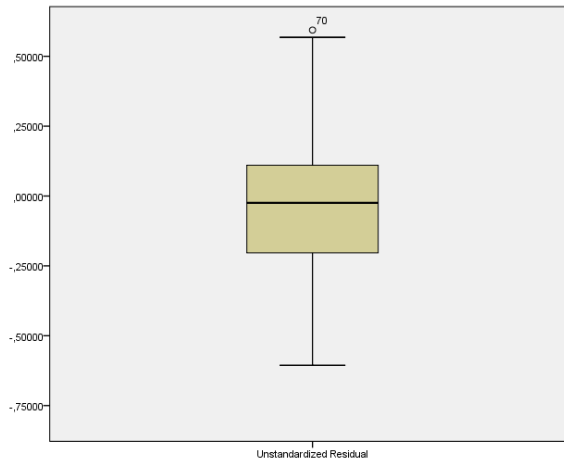
2. Peneliti melakukan uji outlier pertama



3. Peneliti melakukan uji normalitas setelah menghapus sampel yang terdeteksi pada uji outlier pertama

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0180643
	Std. Deviation	,23200772
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,047
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

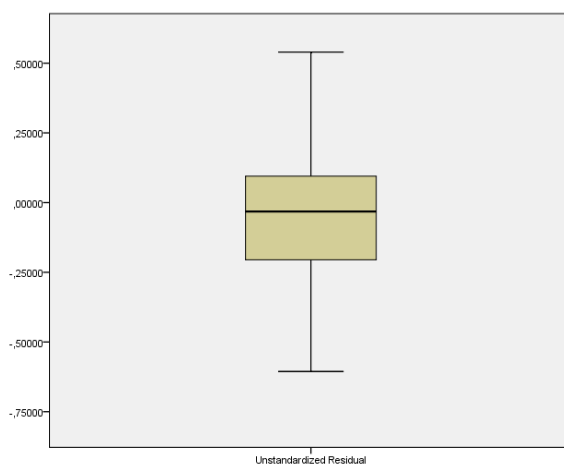
4. Peneliti melakukan uji outlier kedua untuk mengecek masih adakah data yang terdeteksi outlier



5. Peneliti melakukan uji normalitas setelah menghapus sampel yang terdeteksi pada uji outlier kedua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0320986
	Std. Deviation	,22083237
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,046
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

6. Peneliti melakukan uji outlier ketiga untuk mengecek masih adakah data yang terdeteksi outlier



7. Peneliti melakukan uji normalitas final

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0320986
	Std. Deviation	,22083237
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,046
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 6 Data Penelitian Sesudah Outlier

PROVINSI	BD	DAU	DAK	DBH	PAD	JP
SUMUT	3810442642638,60	948867504000,00	38485500000,00	386544541087,00	3578462081779,94	13220900
SUMUT	7082763526441,00	1103389237000,00	41628390000,00	460163932563,00	4050753903338,00	13408200
SUMUT	6738346879653,90	1223445404000,00	54823448000,00	432333703611,00	4091285888816,07	13590300
SUMUT	6115747670917,20	1349132276000,00	59728388000,00	403778317079,00	4416811865266,62	13766900
SUMUT	5628338813603,60	1139261371000,00	47746880500,00	334244916798,00	4883880619308,22	13923262
SUMBAR	1665195339883,00	764680895000,00	40733300000,00	126468426632,00	1224414657998,08	4933100
SUMBAR	2558224338240,59	918560365000,00	32500720000,00	192834767485,00	1225490641909,33	5000200
SUMBAR	2610660896250,92	1039922511000,00	63941974800,00	137015381558,00	1366178102012,90	5066500
SUMBAR	2842088440186,95	1129886306000,00	54108200000,00	149064512233,00	1729222284039,71	5131900
SUMBAR	3230402715616,22	1221128606000,00	62731100000,00	107016709377,00	1876733122796,38	5190577
RIAU	3754114131401,63	380051123500,00	56823400000,00	2789961856924,00	2210130782733,83	5726200
RIAU	5695769976836,48	489179914000,00	62491370000,00	3067171446571,00	2588688445077,20	5879100
RIAU	6387475632939,30	726630916000,00	38738320000,00	2844812993607,00	2725623913109,06	6033300
RIAU	3872730800658,64	820984584000,00	43737510000,00	3367086539743,00	3245087745089,53	6188400
RIAU	5544603975223,72	654220250000,00	63362192000,00	1831045031189,00	3476960097649,19	6330941
JAMBI	1458895869010,50	583882413000,00	24735600000,00	466589706996,00	984232579912,83	3167600
JAMBI	2259162243597,75	731952242000,00	33109538000,00	576140512809,23	995202289115,94	3227100
JAMBI	2546459947959,24	836578062000,00	51035790000,00	599945311316,00	1063879903502,10	3286100
JAMBI	2603725407149,90	948337712000,00	49355510000,00	516825167008,00	1281239472808,44	3344400
JAMBI	2838721753215,74	1009165864000,00	57944770000,00	351969164364,00	1241223028011,76	3397164
SUMSEL	3432684817083,00	646813301000,00	32287000000,00	1313456699412,00	1849119912016,18	7598500
SUMSEL	4560653743214,26	716153261000,00	45401430000,00	1617243959801,00	2001714583551,61	7714300

SUMSEL	5563475998931,20	870516767000,00	25188400000,00	1753511287338,00	2021696787275,10	7828700
SUMSEL	5513061354274,57	985542760000,00	62754900000,00	1934568340798,00	2422673788768,86	7941500
SUMSEL	4497889160889,22	931915470000,00	69405320000,00	1328407541330,00	2534526413315,20	8043042
BENGGKULU	908399387237,00	607388036000,00	36609600000,00	68266688698,00	440920183714,43	1753000
BENGGKULU	1378336235655,00	775311166000,00	28620610000,00	79064896752,00	483768274997,19	1783700
BENGGKULU	1584855547996,40	854647828000,00	51587333000,00	71112795983,00	525207934928,81	1814400
BENGGKULU	1723665668563,00	955095187000,00	53927020000,00	95560468517,00	672064468248,82	1844800
BENGGKULU	2070416553571,20	1046080820000,00	63893200000,00	99011345208,00	701300383228,96	1872136
LAMPUNG	2159104269385,00	769973038000,00	42210200000,00	251104017376,00	1376418352350,29	7735900
LAMPUNG	3363892812536,15	939139287000,00	31087640000,00	310624594963,00	1666717331753,00	7835300
LAMPUNG	3527063690921,85	1060663183000,00	60108230000,00	263272124032,00	1771297934878,73	7932100
LAMPUNG	3731091504819,15	1136053041000,00	48851620000,00	287581907518,00	2274685572912,86	8026200
LAMPUNG	3996405467936,86	1097129439000,00	245066400000,00	172095689636,00	2247342667611,39	8109601
KEPBABEL	959499865946,99	481589915000,00	17880900000,00	201039549139,00	459208310011,69	1258200
KEPBABEL	982147844237,87	634087815000,00	25135650000,00	162276531517,00	438373572678,64	1286600
KEPBABEL	1271021135027,03	717140118000,00	44170570000,00	146525227596,00	495786504873,15	1315100
KEPBABEL	1182430679931,78	806820146000,00	43372460000,00	174950191595,00	563108840861,42	1343900
KEPBABEL	1360034750933,51	897887443000,00	44355816000,00	188157236449,00	571802890055,14	1370331
KEPRIAU	1692024309729,88	395745542000,00	21903200000,00	829255427699,00	620901423130,64	1748800
KEPRIAU	1993600304560,33	460857807000,00	23165600000,00	1110423502004,00	723053960334,89	1805100
KEPRIAU	2432337053488,36	656067610000,00	36672910000,00	1060969973429,00	907982180251,02	1861400
KEPRIAU	3059564530502,84	698009318000,00	41678090000,00	925272475176,00	1070208288698,16	1917400
KEPRIAU	4423031539268,94	695943711000,00	42537210000,00	507640852175,00	1013226321363,58	1986313
JABAR	7576777864856,00	1181553108000,00	45764600000,00	1298760318559,00	8502566839986,35	43938800
JABAR	13761252661652,00	1269960760000,00	48356280000,00	1514429568832,00	9982917414759,00	44643500

JABAR	14402468091806,00	1472453011000,00	80072050000,00	1398007484672,00	12360109870372,00	45340800
JABAR	15336449436973,00	1687686386000,00	78215030000,00	1494604220017,00	15038153309919,00	46029600
JABAR	13681457430252,00	1303654355000,00	18904024000,00	1184319132840,00	16032856414345,00	46668214
JATENG	4149439179371,00	1276180223000,00	51789800000,00	622219342492,00	5564233151730,00	32725400
JATENG	7285316608242,00	1516892951000,00	50630450000,00	751282698223,00	6629308010656,00	32998700
JATENG	8396011662917,00	1670859369000,00	82522510000,00	714432749973,00	8212800640888,00	33264300
JATENG	9161150561924,00	1803931189000,00	79165240000,00	659530315680,00	9916358231432,00	33522700
JATENG	11387301681483,00	1629429283000,00	57972640000,00	569741071740,00	10904825812504,00	33753023
DIY	1294221394645,00	620812328000,00	19489600000,00	82037725053,00	867112885352,87	3510000
DIY	1739517404467,00	757056696000,00	19052740000,00	118434888851,00	1004063125812,33	3552500
DIY	2009915603997,57	828334768000,00	34495900000,00	94731182914,00	1216102749617,01	3594900
DIY	2387197918533,94	899923550000,00	37131610000,00	76756229590,00	1464604954200,16	3637100
DIY	2795636515967,65	920544722000,00	39084040000,00	62257506197,00	1593110769595,00	3675768
JATIM	7774106639974,19	1347501699000,00	55031200000,00	1125553550989,00	8898616683296,90	37840700
JATIM	10982256889086,30	1491561136000,00	53490060000,00	1523964905831,00	9584081971227,10	38106600
JATIM	12670706302297,80	1623648287000,00	85644430000,00	1374591582095,00	11579340719021,90	38363200
JATIM	12708929897078,90	1866548185000,00	101875970000,00	1516912612166,00	14442216534958,90	38610200
JATIM	15129348547368,70	1587261707000,00	66039190000,00	1462318221152,00	15402647674502,50	38828061
BALI	1897376313003,42	560673539000,00	15916275000,00	128698319040,00	1723807095831,05	3957600
BALI	2728951897110,40	694079080000,00	34025910000,00	180266157269,00	2042091095774,66	4007200
BALI	3197308351398,22	792365876000,00	43835380000,00	144513543525,00	2529976146703,70	4056300
BALI	4011394613668,32	832297473000,00	41600750000,00	144532785887,00	2920416697074,56	4104900
BALI	3220486920376,26	831597268000,00	134496571000,00	104103308350,00	2910661548976,61	4148588
NTB	1473934430586,27	646671083000,00	45964400000,00	162674615727,00	741291174995,39	4581800
NTB	1993680075392,53	809617715000,00	53326340000,00	191526128114,00	745979866410,64	4646800

NTB	2159468418448,14	859353026000,00	57407690000,00	158244269595,00	858154094987,46	4710800
NTB	2159296778711,33	980390340000,00	54663430000,00	177032677141,00	1115060397173,45	4773800
NTB	2916700347575,78	1088633717000,00	214257150000,00	147804397778,00	1372661567125,00	4830118
NTT	1143832766173,00	752057444000,00	47399400000,00	87834594936,00	391828733404,00	4788600
NTT	2027715118403,00	940646764000,00	57088950000,00	101259360750,00	458793895486,00	4871200
NTT	2234008404402,00	1003991703000,00	77822660000,00	84034259793,00	523201203067,00	4954000
NTT	2421833119667,00	1131667590000,00	74235910000,00	76821847275,00	763300806702,00	5036900
NTT	2983355501405,00	1300445875000,00	100654710000,00	60821837707,00	882315240378,00	5112760
KALBAR	1704722621089,25	845483888000,00	38369500000,00	154006771302,00	1080421507604,31	4488900
KALBAR	2596615435199,25	1023229807000,00	43913040000,00	182691159483,00	1164425411547,34	4565600
KALBAR	2840660259231,72	1144712840000,00	74172390000,00	163157232642,00	1347396423743,14	4641600
KALBAR	3216973537840,85	1290222856000,00	63189480000,00	178456566983,00	1621610890848,66	4716100
KALBAR	2957561431058,21	1405594169000,00	85584200000,00	153476958863,00	1702542350065,28	4783209
KALTENG	1232853880707,28	795816335000,00	51915000000,00	235356781046,00	815244765132,56	2275100
KALTENG	1978823943039,60	951256068000,00	50184280000,00	293906722800,00	963662159745,78	2329800
KALTENG	2442752181555,47	1062516940000,00	63299310000,00	316661423796,00	1093821486342,18	2384700
KALTENG	2708401254079,75	1152428738000,00	61929830000,00	343057931094,00	1253708122296,09	2439900
KALTENG	2943921541005,60	1280595848000,00	72525960000,00	320254878956,00	1174969266556,62	2490178
KALSEL	1920926676401,17	504876152000,00	37246400000,00	653442462393,00	1868594744036,27	3714300
KALSEL	2639283785253,94	652535312000,00	38848250000,00	843080216392,00	2476159926154,70	3785000
KALSEL	3626018880913,98	683511441000,00	41553540000,00	780058338103,00	2502279216337,25	3854500
KALSEL	3685223275692,94	701725536000,00	54189940000,00	767799139711,00	2898704954479,94	3922800
KALSEL	3978267063762,48	571244689000,00	63890470000,00	939985570450,00	2584908313890,91	3984315
SULUT	1098324927911,00	619711007000,00	29288200000,00	80361935173,00	535087974492,00	2305900
SULUT	1572961922508,00	790534491000,00	43539930000,00	99292276430,00	633650532712,00	2333500

SULUT	1769413775799,00	885684277000,00	54346140000,00	89815076904,00	790273619619,00	2360400
SULUT	1935649830151,00	949852622000,00	59675060000,00	84421635889,00	937681926708,00	2386600
SULUT	2265349528201,00	1026948809000,00	76744790000,00	69347787645,00	1012945961386,00	2409921
SULTENG	1246882296673,25	743161759000,00	38179100000,00	82887818405,00	519844404991,21	2692800
SULTENG	1791572130097,02	790534491000,00	43237070000,00	97601766326,00	605821437425,82	2739300
SULTENG	1950726964800,50	994658685000,00	65949350000,00	100189491883,00	662226615049,50	2785500
SULTENG	2445661248020,50	1087885014000,00	63942480000,00	87949453097,00	824611352385,31	2831300
SULTENG	2645745703931,07	1221602865000,00	250986290000,00	85165410164,00	904937124509,16	2872857
SULSEL	2083425143735,05	816757969000,00	41886000000,00	248345220303,00	1959515902109,82	8156100
SULSEL	3927067917825,34	902087729000,00	42774470000,00	309478526666,00	2198776396284,65	8250000
SULSEL	4081099922430,16	1089771438000,00	64264340000,00	268130040457,00	2560045632511,80	8342000
SULSEL	4499032192457,29	1209598741000,00	72976480000,00	248811019824,00	3029122238495,78	8432200
SULSEL	4514809893426,89	1180010167000,00	222686392000,00	188057830411,00	3270828511466,51	8512608
SULTRA	1004037893490,76	700836557000,00	33804600000,00	82744077124,00	346169830959,16	2294400
SULTRA	1610635836383,46	996939584000,00	34659800000,00	115207475481,00	439184485917,41	2345500
SULTRA	1598130177442,82	981035741000,00	53266770000,00	126593343568,00	514857031059,96	2396700
SULTRA	1885381745505,78	1053636011000,00	58750010000,00	123630558241,00	599942751257,23	2448100
SULTRA	2045586878945,00	1176423577000,00	86399950000,00	121027372555,00	667079209826,08	2495248
GRNTL	668200748748,00	461118102000,00	28057200000,00	26813585384,00	157472326552,91	1062600
GRNTL	829838428133,00	869882871000,00	24008330000,00	30858457335,00	180039376122,83	1080300
GRNTL	972578382602,00	652284261000,00	43013530000,00	26800697898,00	214614527481,13	1098000
GRNTL	1091851536360,55	734279438000,00	42374060000,00	23660330654,00	281920210038,54	1115600
GRNTL	1266971897927,00	845395651000,00	87883960000,00	20766583149,00	289557151741,95	1131670
SULBAR	693251740696,00	441578798000,00	35860700000,00	35302600280,00	114310884837,04	1187500
SULBAR	817093086943,00	590680361000,00	36786280000,00	43679976683,00	140396939510,00	1210700

SULBAR	964108706424,00	685497592000,00	47017000000,00	39591545666,00	154131860472,00	1234300
SULBAR	1157422383585,82	776214122000,00	50585710000,00	30299102754,00	223704907218,29	1258100
SULBAR	1385841990547,96	895580933000,00	72513950000,00	23535722275,00	273507239232,00	1279994
MALUKU	1050078384226,20	703993953000,00	44657700000,00	79621224533,00	221882123096,08	1570700
MALUKU	1276193041795,14	829491474000,00	38062680000,00	91350628092,00	266227289574,54	1599500
MALUKU	1485053522135,51	897657192000,00	53424880000,00	75747288758,00	304364504300,28	1628400
MALUKU	1726133264289,81	1019704312000,00	70134160000,00	75633451932,00	425425607781,12	1657400
MALUKU	2096259256383,20	1177774674000,00	216914600000,00	58460626103,00	390813371781,13	1683856
MALUT	684991121948,00	540389811000,00	51233800000,00	99383715937,00	84773698195,70	1067200
MALUT	1215801421932,00	703159025000,00	37858020000,00	117013965138,00	115905322981,68	1091100
MALUT	1387593135306,00	772591162000,00	69688380000,00	98387626467,00	165886906927,52	1114900
MALUT	1398293236323,42	906623550000,00	74623090000,00	108427698801,00	203059697909,92	1138700
MALUT	1667548584180,00	1061177950000,00	146686448000,00	95965198014,00	236054304107,32	1160275
PAPUA	6186706650384,75	1276285908000,00	72115650000,00	545083289030,00	363100749953,73	2915300
PAPUA	7125265905120,00	1569782444000,00	106191170000,00	442476496170,00	623162647355,00	2973800
PAPUA	7938551683742,00	1889267850000,00	133897240000,00	487855595954,00	633726316291,00	3032500
PAPUA	10023005710304,00	1991202341100,00	120505640000,00	532105015586,00	944929691841,00	3091000
PAPUA	7275918304885,00	2277932698000,00	460303520000,00	517999391860,00	912908312259,00	3143088
PABAR	3157087036882,00	700444910000,00	40538900000,00	742881620930,00	152163908940,53	786000
PABAR	3450877647112,00	901398453000,00	38633110000,00	576125138593,00	175450133075,69	807000
PABAR	3736984779344,10	1064872637000,00	64931200000,00	1862951513294,00	236282889480,20	828300
PABAR	3229645614556,00	1122264659000,00	61215730000,00	1600164845923,00	306674697583,22	849800
PABAR	4143993546875,99	1284079495000,00	92376080000,00	1119808321072,00	322799297751,61	868819

Lampiran 7 Data Penelitian (Log Normalitas) Sesudah Outlier

PROVINSI	LnBD	LnDAU	LnDAK	LnDBH	LnPAD	LnJP
SUMUT	28,97	27,58	24,37	26,68	28,91	16,40
SUMUT	29,59	27,73	24,45	26,85	29,03	16,41
SUMUT	29,54	27,83	24,73	26,79	29,04	16,42
SUMUT	29,44	27,93	24,81	26,72	29,12	16,44
SUMUT	29,36	27,76	24,59	26,54	29,22	16,45
SUMBAR	28,14	27,36	24,43	25,56	27,83	15,41
SUMBAR	28,57	27,55	24,20	25,99	27,83	15,42
SUMBAR	28,59	27,67	24,88	25,64	27,94	15,44
SUMBAR	28,68	27,75	24,71	25,73	28,18	15,45
SUMBAR	28,80	27,83	24,86	25,40	28,26	15,46
RIAU	28,95	26,66	24,76	28,66	28,42	15,56
RIAU	29,37	26,92	24,86	28,75	28,58	15,59
RIAU	29,49	27,31	24,38	28,68	28,63	15,61
RIAU	28,98	27,43	24,50	28,85	28,81	15,64
RIAU	29,34	27,21	24,87	28,24	28,88	15,66
JAMBI	28,01	27,09	23,93	26,87	27,62	14,97
JAMBI	28,45	27,32	24,22	27,08	27,63	14,99
JAMBI	28,57	27,45	24,66	27,12	27,69	15,01
JAMBI	28,59	27,58	24,62	26,97	27,88	15,02
JAMBI	28,67	27,64	24,78	26,59	27,85	15,04
SUMSEL	28,86	27,20	24,20	27,90	28,25	15,84
SUMSEL	29,15	27,30	24,54	28,11	28,33	15,86
SUMSEL	29,35	27,49	23,95	28,19	28,33	15,87
SUMSEL	29,34	27,62	24,86	28,29	28,52	15,89
SUMSEL	29,13	27,56	24,96	27,92	28,56	15,90
BENGGKULU	27,53	27,13	24,32	24,95	26,81	14,38
BENGGKULU	27,95	27,38	24,08	25,09	26,90	14,39
BENGGKULU	28,09	27,47	24,67	24,99	26,99	14,41
BENGGKULU	28,18	27,59	24,71	25,28	27,23	14,43
BENGGKULU	28,36	27,68	24,88	25,32	27,28	14,44
LAMPUNG	28,40	27,37	24,47	26,25	27,95	15,86
LAMPUNG	28,84	27,57	24,16	26,46	28,14	15,87
LAMPUNG	28,89	27,69	24,82	26,30	28,20	15,89
LAMPUNG	28,95	27,76	24,61	26,38	28,45	15,90
LAMPUNG	29,02	27,72	26,22	25,87	28,44	15,91
KEPBABEL	27,59	26,90	23,61	26,03	26,85	14,05
KEPBABEL	27,61	27,18	23,95	25,81	26,81	14,07
KEPBABEL	27,87	27,30	24,51	25,71	26,93	14,09

KEPBABEL	27,80	27,42	24,49	25,89	27,06	14,11
KEPBABEL	27,94	27,52	24,52	25,96	27,07	14,13
KEPRIAU	28,16	26,70	23,81	27,44	27,15	14,37
KEPRIAU	28,32	26,86	23,87	27,74	27,31	14,41
KEPRIAU	28,52	27,21	24,33	27,69	27,53	14,44
KEPRIAU	28,75	27,27	24,45	27,55	27,70	14,47
KEPRIAU	29,12	27,27	24,47	26,95	27,64	14,50
JABAR	29,66	27,80	24,55	27,89	29,77	17,60
JABAR	30,25	27,87	24,60	28,05	29,93	17,61
JABAR	30,30	28,02	25,11	27,97	30,15	17,63
JABAR	30,36	28,15	25,08	28,03	30,34	17,64
JABAR	30,25	27,90	23,66	27,80	30,41	17,66
JATENG	29,05	27,87	24,67	27,16	29,35	17,30
JATENG	29,62	28,05	24,65	27,35	29,52	17,31
JATENG	29,76	28,14	25,14	27,29	29,74	17,32
JATENG	29,85	28,22	25,09	27,21	29,93	17,33
JATENG	30,06	28,12	24,78	27,07	30,02	17,33
DIY	27,89	27,15	23,69	25,13	27,49	15,07
DIY	28,18	27,35	23,67	25,50	27,64	15,08
DIY	28,33	27,44	24,26	25,27	27,83	15,10
DIY	28,50	27,53	24,34	25,06	28,01	15,11
DIY	28,66	27,55	24,39	24,85	28,10	15,12
JATIM	29,68	27,93	24,73	27,75	29,82	17,45
JATIM	30,03	28,03	24,70	28,05	29,89	17,46
JATIM	30,17	28,12	25,17	27,95	30,08	17,46
JATIM	30,17	28,26	25,35	28,05	30,30	17,47
JATIM	30,35	28,09	24,91	28,01	30,37	17,47
BALI	28,27	27,05	23,49	25,58	28,18	15,19
BALI	28,63	27,27	24,25	25,92	28,34	15,20
BALI	28,79	27,40	24,50	25,70	28,56	15,22
BALI	29,02	27,45	24,45	25,70	28,70	15,23
BALI	28,80	27,45	25,62	25,37	28,70	15,24
NTB	28,02	27,20	24,55	25,82	27,33	15,34
NTB	28,32	27,42	24,70	25,98	27,34	15,35
NTB	28,40	27,48	24,77	25,79	27,48	15,37
NTB	28,40	27,61	24,72	25,90	27,74	15,38
NTB	28,70	27,72	26,09	25,72	27,95	15,39
NTT	27,77	27,35	24,58	25,20	26,69	15,38
NTT	28,34	27,57	24,77	25,34	26,85	15,40
NTT	28,43	27,64	25,08	25,15	26,98	15,42
NTT	28,52	27,75	25,03	25,06	27,36	15,43

NTT	28,72	27,89	25,33	24,83	27,51	15,45
KALBAR	28,16	27,46	24,37	25,76	27,71	15,32
KALBAR	28,59	27,65	24,51	25,93	27,78	15,33
KALBAR	28,68	27,77	25,03	25,82	27,93	15,35
KALBAR	28,80	27,89	24,87	25,91	28,11	15,37
KALBAR	28,72	27,97	25,17	25,76	28,16	15,38
KALTENG	27,84	27,40	24,67	26,18	27,43	14,64
KALTENG	28,31	27,58	24,64	26,41	27,59	14,66
KALTENG	28,52	27,69	24,87	26,48	27,72	14,68
KALTENG	28,63	27,77	24,85	26,56	27,86	14,71
KALTENG	28,71	27,88	25,01	26,49	27,79	14,73
KALSEL	28,28	26,95	24,34	27,21	28,26	15,13
KALSEL	28,60	27,20	24,38	27,46	28,54	15,15
KALSEL	28,92	27,25	24,45	27,38	28,55	15,16
KALSEL	28,94	27,28	24,72	27,37	28,70	15,18
KALSEL	29,01	27,07	24,88	27,57	28,58	15,20
SULUT	27,72	27,15	24,10	25,11	27,01	14,65
SULUT	28,08	27,40	24,50	25,32	27,17	14,66
SULUT	28,20	27,51	24,72	25,22	27,40	14,67
SULUT	28,29	27,58	24,81	25,16	27,57	14,69
SULUT	28,45	27,66	25,06	24,96	27,64	14,70
SULTENG	27,85	27,33	24,37	25,14	26,98	14,81
SULTENG	28,21	27,40	24,49	25,30	27,13	14,82
SULTENG	28,30	27,63	24,91	25,33	27,22	14,84
SULTENG	28,53	27,72	24,88	25,20	27,44	14,86
SULTENG	28,60	27,83	26,25	25,17	27,53	14,87
SULSEL	28,37	27,43	24,46	26,24	28,30	15,91
SULSEL	29,00	27,53	24,48	26,46	28,42	15,93
SULSEL	29,04	27,72	24,89	26,31	28,57	15,94
SULSEL	29,13	27,82	25,01	26,24	28,74	15,95
SULSEL	29,14	27,80	26,13	25,96	28,82	15,96
SULTRA	27,64	27,28	24,24	25,14	26,57	14,65
SULTRA	28,11	27,63	24,27	25,47	26,81	14,67
SULTRA	28,10	27,61	24,70	25,56	26,97	14,69
SULTRA	28,27	27,68	24,80	25,54	27,12	14,71
SULTRA	28,35	27,79	25,18	25,52	27,23	14,73
GRNTL	27,23	26,86	24,06	24,01	25,78	13,88
GRNTL	27,44	27,49	23,90	24,15	25,92	13,89
GRNTL	27,60	27,20	24,48	24,01	26,09	13,91
GRNTL	27,72	27,32	24,47	23,89	26,36	13,92
GRNTL	27,87	27,46	25,20	23,76	26,39	13,94

SULBAR	27,26	26,81	24,30	24,29	25,46	13,99
SULBAR	27,43	27,10	24,33	24,50	25,67	14,01
SULBAR	27,59	27,25	24,57	24,40	25,76	14,03
SULBAR	27,78	27,38	24,65	24,13	26,13	14,05
SULBAR	27,96	27,52	25,01	23,88	26,33	14,06
MALUKU	27,68	27,28	24,52	25,10	26,13	14,27
MALUKU	27,87	27,44	24,36	25,24	26,31	14,29
MALUKU	28,03	27,52	24,70	25,05	26,44	14,30
MALUKU	28,18	27,65	24,97	25,05	26,78	14,32
MALUKU	28,37	27,79	26,10	24,79	26,69	14,34
MALUT	27,25	27,02	24,66	25,32	25,16	13,88
MALUT	27,83	27,28	24,36	25,49	25,48	13,90
MALUT	27,96	27,37	24,97	25,31	25,83	13,92
MALUT	27,97	27,53	25,04	25,41	26,04	13,95
MALUT	28,14	27,69	25,71	25,29	26,19	13,96
PAPUA	29,45	27,87	25,00	27,02	26,62	14,89
PAPUA	29,59	28,08	25,39	26,82	27,16	14,91
PAPUA	29,70	28,27	25,62	26,91	27,17	14,92
PAPUA	29,94	28,32	25,51	27,00	27,57	14,94
PAPUA	29,62	28,45	26,86	26,97	27,54	14,96
PABAR	28,78	27,27	24,43	27,33	25,75	13,57
PABAR	28,87	27,53	24,38	27,08	25,89	13,60
PABAR	28,95	27,69	24,90	28,25	26,19	13,63
PABAR	28,80	27,75	24,84	28,10	26,45	13,65
PABAR	29,05	27,88	25,25	27,74	26,50	13,67

Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas

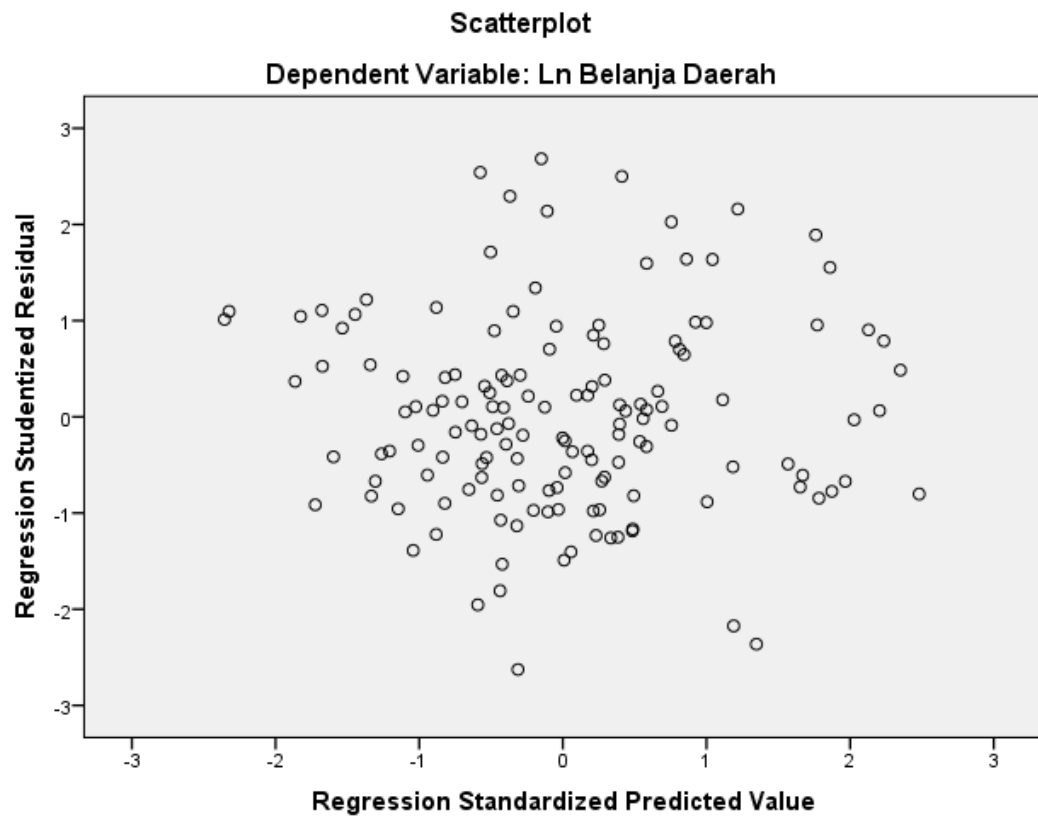
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0320986
	Std. Deviation	,22083237
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,046
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000		
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000	,426	2,349
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017	,573	1,745
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000	,593	1,685
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000	,120	8,335
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151	,128	7,836

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,909	,906	,22174	1,297
a. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD					
b. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah					

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 13 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68,531	5	13,706	278,751	,000 ^b
	Residual	6,835	139	,049		
	Total	75,366	144			
a. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD						

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 14 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,943	1,763		-4,505	,000
	Ln DAU	,754	,084	,352	8,984	,000
	Ln DAK	,113	,047	,082	2,423	,017
	Ln DBH	,271	,020	,452	13,634	,000
	Ln PAD	,173	,046	,278	3,776	,000
	Ln JP	,073	,050	,103	1,444	,151

a. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

Lampiran 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,909	,906	,22174	1,297
a. Predictors: (Constant), Ln JP, Ln DAK, Ln DBH, Ln DAU, Ln PAD					
b. Dependent Variable: Ln Belanja Daerah					

Sumber: *Output IBM SPSS Statistics Version 24 (2017)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasya Noviar Gemilang, lahir di Jakarta, 26 November 1995. Merupakan anak perempuan dari pasangan Harhar Sucharyana dan Yayuk Asniati. Anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki 2 adik yang bernama Hafiyyan dan Ghaniya. Bertempat tinggal di Komplek Marinir, Jalan

Lapangan Tembak No 7, RT 11/005, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Menempuh pendidikan formal pada TK Al-Hidayah lulus pada tahun 2001, kemudian SDN Cilandak Timur 03 Pagi lulus pada tahun 2007, dilanjutkan SMP Sumbangsih 1 lulus pada tahun 2010, lalu SMAN 66 Jakarta lulus pada tahun 2013, dan Universitas Negeri Jakarta lulus pada tahun 2017.

Penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai anggota Biro Dana dan Usaha pada tahun 2013-2014 dan Badan Perwakilan Mahasiswa sebagai anggota Badan Aspirasi Mahasiswa pada tahun 2014-2015.